

**KONSISTENSI PKS DALAM MEMPERJUANGKAN HARKAT
DAN MARTABAT PEREMPUAN
(Studi Pada: DPD PKS Lampung Utara)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin**

Oleh

TRI MAHTUTI

NPM. 1331040012

Jurusan: Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

**KONSISTENSI PKS DALAM MEMPERJUANGKAN
HARKAT DAN MARTABAT PEREMPUAN
(Studi Pada: DPD PKS Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh

**TRI MAHTUTI
NPM. 1331040012**

Jurusan: Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr.H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag.

Pembimbing II : Dr.H. Nadirsah Hawari M.A.



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2017 M**

PERNYATAAN KEASLIAAN / ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Mahtuti

NPM : 1331040012

Program Study : Pemikiran Politik Islam (PPI)

menyatakan dengan sebenar –

benarnya bahwa skripsi yang berjudul, **Konsistensi PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan (studi pada : DPD PKS Lampung Utara)** adalah benar – benar karya asli saya, kecuali bagian yang disebutkan sumbernya.

Apabila kemudian hari ditemukan ketidak benaran dari pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima segala sangsi yang diakibatkannya.



Bandar Lampung, September 2017

Tri Mahtuti
NPM. 1331040012

ABSTRAK
KONSISTENSI PKS DALAM MEMPERJUANGKAN HARKAT
DAN MARTABAT PEREMPUAN
(Studi pada: DPD PKS Lampung Utara)
Oleh
TRI MAHTUTI

Skripsi ini membahas tentang konsistensi PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan. Fenomena politik perempuan di Indonesia telah lama menjadi perdebatan yang belum kunjung usai. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya tepat menjadi pelayan rumah tangga dan tidak cocok untuk berperan aktif dalam fungsi publik di negaranya, meskipun dalam agama Islam tidak ditemukan satu ketentuan yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, karena ajaran Islam tidak membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki sudah cukup banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan landasan untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana konsep dan platform PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan dan bagaimana bentuk-bentuk kegiatan PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan platform PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan dan bentuk-bentuk kegiatan PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer dalam penelitian ini adalah Agung Utomo, Muhammad Alfian, Muhammad Nuzul Setiawan, Nanik Masrurin serta dokumentasi berupa AD/ART PKS, Platform PKS, panduan bidang perempuan, serta dokumentasi-dokumentasi kegiatan PKS, sedangkan data sekundernya berupa buku-buku kajian tentang perempuan, dan beberapa masyarakat perempuan di Lampung Utara. Metode yang dipakai yaitu metode interview, dokumentasi dan observasi data yang di peroleh dan di analisis secara teliti.

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat di ketahui konsistensi PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara dengan mengadakan suatu kegiatan-kegiatan tidak terlepas dari konsep dan platform PKS. Mendorong suasana kemitraan yang tulus antara kaum perempuan dan lelaki mewujudkan perempuan Indonesia yang taqwa, sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudidaya. Untuk mengimplementasikan platform maka diterjemahkan menjadi program kegiatan yang nyata, diantara program-program kegiatan tersebut adalah: peningkatan ekonomi, penyuluhan kesehatan perempuan, baca tulis Al-Quran,

mengadakan acara peringatan hari nasional, pengajian rutin, terjun langsung ke masyarakat untuk berdakwah guna pemberdayaan perempuan, dan mendengarkan keluhan masyarakat. Selain itu, struktur sangat mendukung perempuan dalam berkiprah di bidang politik, terbukti bahwa keterlibatan separuh anggota perempuan dalam menduduki jabatan penting di kepengurusan DPD PKS Lampung Utara.



MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah/09:71)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:

“Sesungguhnya puncak kemuliaan yaitu dengan tetap istiqamah”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Riono dan Ibu Rumini yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan membimbingku sejak kecil hingga dewasa serta berjuang dan mendo'akan keberhasilan harapan dan cita-citaku.
2. Kepada kakak tercinta Nur Isro', Sri Wahyuni, Heru Yunianto dan adik tersayang Puji Aprilliani, Vio Labib Lasendriya, yang telah memberikan do'a serta dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dosen pembimbing I Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag serta pembimbing II Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan bimbingan serta ilmu yang bermanfaat untuk penulis.
5. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku Nanda FH harahap, Yuni Sari, Sri lestari, Sri purwanti, serta teman-teman Pemikiran Politik Islam Veni Octaviani, Rasniati, Tislam Nurkarin, Maila Yunfa Safitri, Dewi Astuti, Nika Marina, Ridha Nahliwati, Catur salindri dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan satu persatu serta teman-teman angkatan 2013 baik dari jurusan PPI, TH, AF, PA yang selalu berjuang turut membantu baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga.

RIWAYAT HIDU

Tri Mahtuti dilahirkan di desa Gedung Makripat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 23 Pebruari 1994 anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Riono dan Ibunda Rumini.

Jenjang pendidikan dimulai dari SDN 1 Gedung Makripat dan selesai pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan sekolah di MTs Amal Kita Gedung Negara Lampung Utara selesai pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan sekolah di MAN 02 Padang Ratu Lampung Utara selesai pada tahun 2012. Ketiga dijalani dan diselesaikan dengan lancar. Kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 TA. 2013/2017.

Pada tahun 2015 Penulis memperoleh beasiswa DIPA prestasi UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2006/2009 sampai 2010/2012 penulis aktif di ekstrakurikuler pramuka dan rohis. Dan di tahun 2013 penulis mulai aktif di organisasi bahasa UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, September 2017
Penulis,

Tri Mahtuti
NPM.1331040012

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, dengan izinnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin besar revolusi Islam, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya *Minadzulumati illa nur* dan kesejahteraan semoga selalu tercurahkan kepada keluarga besar beliau, sahabat-sahabat-Nya, dan kita sebagai umat-Nya semoga mendapatkan syafaatnya di *Yaumul Kiyamah* kelak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak karena bimbingan dan motivasinya sehingga terselesaikan skripsi ini pada waktu yang telah di rencanakan, oleh karena itu tidak lupa penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag** selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak **Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M. Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga tersusun skripsi ini.

3. Bapak **Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A** selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam, sekaligus sebagai pembimbing II yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran serta memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu **Tin Amalia Fitri, S. Sos, M.Si** selaku Sekertaris Jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. bapak **Drs. Effendi, M. Hum**, dan bapak **Dr. H. Sudarman, M.Ag** sebagai dewan penguji yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Para dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, khususnya Jurusan Pemikiran Politik Islam.
7. Para karyawan dan tenaga administrasi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama serta Kepala perpustakaan Daerah provinsi Lampung atas diperkenankannya penulis meminjam literatur yang dibutuhkan.
9. Bapak **Agung Utomo, S.Sos** selaku ketua DPD PKS Lampung Utara dan ibu **Nanik Masrurin** selaku ketua bidang perempuan serta kader-kader

PKS Lampung Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di DPD PKS Lampung Utara.

10. Bapak **Mardani Umar, S.H, M.H.** selaku Anggota DPRD Provinsi Lampung yang turut membantu menyumbangkan ilmunya kepada penulis.
11. Bapak **Kamhir S. Ag** selaku kepala sekolah MTs Amal Kita yang telah memberikan pengarahan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Bapak **HI. Syahrizal Adhar** selaku kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Utara yang turut membantu penulis meminjam literatur yang dibutuhkan.
13. Semua pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Bandar Lampung, September 2017

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Tinjauan Pustaka	12
H. Metode Penelitian	14

BAB II KONSISTENSI DAN HARKAT MARTABAT PEREMPUAN

A. Konsistensi PKS	22
1. Pengertian Konsistensi	22
2. Bentuk-bentuk konsistensi	23
3. Konsisten dalam Al-Qur'an dan Hadits	25
B. Harkat dan Martabat perempuan	26
1. Pengertian harkat dan martabat perempuan	26
2. Harkat martabat perempuan dalam pandangan Islam	27
3. Kedudukan perempuan dalam politik	29

BAB III SEJARAH LAMPUNG UTARA DAN STRUKTUR DPD PKS DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. Lampung Utara	36
1. Sejarah berdirinya Lampung Utara	36
2. Pemerintahan	41
3. Perekonomian	43
B. DPD PKS Lampung Utara	50
1. Sejarah Berdirinya DPD PKS Lampung Utara	50
2. Struktur Organisasi DPD PKS Lampung Utara	52
3. Visi dan misi PKS	60
4. Pola Pengkaderan.....	62
5. Ideologi dan platform PKS	63
C. Bidang Perempuan DPD PKS Lampung Utara	69
1. Bidang perempuan	69
2. Kebijakan umum PKS tentang perempuan	71

BAB IV KIPRAH PKS DALAM MEMPERJUANGKAN HARKAT DAN MARTABAT PEREMPUAN DI LAMPUNG UTARA

A. Konsep dan platform PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara	75
B. Bentuk-bentuk kegiatan PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah “*Konsistensi PKS Dalam Memperjuangkan Harkat dan martabat perempuan (Studi Pada: DPD PKS Lampung Utara)*” untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami kalimat judul penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud atau arti dari kata-kata atau istilah yang terdapat pada judul.

Konsistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketetapan atau kemantapan dalam bertindak.¹ Konsistensi yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu tindakan yang dilakukan terus menerus oleh partai PKS untuk memperjuangkan harkat dan martabat perempuan dalam dunia politik.

Partai Keadilan Sejahtera disingkat PKS adalah partai dakwah yang memiliki visi yaitu menjadi partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat untuk umat, bangsa, dan Negara.² Maka semua langkah perjuangan politiknya akan di upayakan demi terwujudnya kepemimpinan nasional yang adil dan mensejahterakan serta meningkatkan *Ukhuwah Islamiyah*.³ Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Lampung Utara pada tahun 1999.⁴ Dalam hal ini penulis

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cet. Ke-3, h. 611.

²AD/ART Partai Keadilan Sejahtera, Bab 1, h. 2.

³Sapto Waluyo, *kebangkitan politik dakwah konsep dan praktek politik Partai Keadilan Sejahtera di masa transisi*, (Bandung: harkatuna publishing, 2005), h. 368.

⁴Erika, Ketua Humas PKS, Wawancara dengan penulis, Kotabumi, 09 November 2016.

membatasi penelitian di DPD PKS bukan pada lembaganya melainkan pada Fungsionarisnya.

Memperjuangkan yang dimaksud dalam judul ini adalah kesungguhan PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan dalam kiprah politik atau anggota dewan, perempuan dalam kiprah dakwah, perempuan dalam struktur partai. Harkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) derajat kemuliaan.⁵ Martabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tingkat; pangkat; atau harga diri. Martabat menurut Miriam budiardjo adalah setiap manusia berhak menjaga harga dirinya karena setiap manusia sudah memiliki hak yang melekat sejak lahir dan terbawa dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Harkat dan martabat yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu kedudukan penting yang diberikan kepada perempuan untuk dapat berkiprah di dunia politik dengan menduduki jabatan sebagai pejabat pemerintah yang dapat memberikan suatu keputusan atau kebijakan.

Perempuan berasal dari kata *empu* yang memiliki arti dihargai,⁶ dipertuan atau dihormati.⁷ Perempuan bisa disebut juga sebagai wanita, putri, istri, ibu.⁸ Perempuan adalah termometer masyarakat dan

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2008), Cet. Ke-4, h. 484.

⁶Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), Cet. Ke-1, h. 19.

⁷Cristina S.Handayani, dan ardiyanovianto, *kuasa wanita jawa*, (Yogyakarta: PT Lkis pelangi aksara, 2004), h. Vi.

⁸Moenawir Chalil, *Nilai wanita*, (Solo: Ramadani, 1984), h. 11.

orang dapat mengukur majunya suatu Negara itu, dilihat dari perempuan-perempuan yang ada di dalam suatu Negara tersebut.⁹

Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksudkan dalam judul skripsi adalah konsistensi PKS sebagai partai Islam dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan dalam dunia politik dakwah di dalam masyarakat sosial yang di tempuh melalui jalur struktural partai maupun dakwah kultural di masyarakat, dengan merujuk pada AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), program-program partai, sikap-sikap politik di dalam suatu masyarakat.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul konsistensi PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan (Studi pada: DPD PKS Lampung Utara) adalah:

1. Dewasa ini kedudukan perempuan sering dianggap lebih rendah dibanding kedudukan kaum laki-laki. Perempuan dianggap tidak mampu bersaing dan berbuat banyak, misalnya dalam bidang politik, faktor yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya tepat sebagai pelayan rumah tangga, tidak cocok berperan aktif dalam fungsi publik di masyarakat. Terlebih lagi tidak sedikit kerusakan moral pada perempuan saat ini terbilang buruk sehingga perempuan dipandang sebelah mata, atas dasar itu kemudian PKS Lampung

⁹Hadiyah Salim, *Wanita Islam kepribadian dan perjuangannya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. Ke-7, h.14.

Utara berusaha untuk memperjuangkan harkat martabat perempuan agar tidak lagi dianggap rendah. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara.

2. Penulis mengarah pada konsistensi PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan karena PKS merupakan salah satu partai Islam yang memperjuangkan kiprah perempuan dalam politik sebab masih terjadi pro kontra dari sebagian para ulama mengenai hal tersebut.
3. Karena lokasinya yang terjangkau sehingga mudah untuk memperoleh data-data dan literatur yang diperlukan oleh penulis dan judul yang dibahas sesuai dengan jurusan yang ditekuni oleh penulis yaitu Pemikiran Politik Islam sehingga penelitian ini mendukung untuk mempercepat dalam penyelesaian skripsi.



C. Latar Belakang Masalah

Perempuan dalam panggung sejarah banyak menceritakan kisah pilu dibandingkan persona kemuliaan, seperti yang kita ketahui bahwa hadirnya Islam seperti memberikan angin sejuk bagi kondisi perempuan saat itu. Hal ini disebabkan karena keadaan perempuan pada zaman sebelum Islam datang menempati posisi yang sangat memilukan. Dalam kerangka mengadakan pemberdayaan perempuan, maka satu hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah bahwa adanya upaya serius untuk menempatkan harkat perempuan pada posisi sederajat dengan laki-laki.¹⁰

Prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah menyembah kepada Tuhan, disebutkan dalam Q.s Adz-Dzariyaat/51:56.¹¹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. [Q.s. Adz-Dzariyaat/51:56]

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai potensi peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal dalam al-Qur'an bisa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (*muttaq'un*), dan untuk mencapai derajat

¹⁰Tari Siwi Utami, *Perempuan politik di parlemen*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), Cet. Ke-1, h. 16.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV diponegoro, 2008), h. 523.

mutta'qun ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa atau kelompok etnis tertentu.¹²

Salah satu penduduk Islam terbesar adalah Negara Indonesia. Perempuan di Indonesia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota parlemen sejak pertama kali diadakannya pemilu pada tahun 1955. Dan ini adalah kesempatan bagi kaum perempuan sendiri untuk membuktikan kemampuannya dalam dunia politik. Namun dalam hal ini, keikutsertaan perempuan dalam dunia politik masih sangat sedikit itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: pertama, terdapat pro kontra dikalangan masyarakat maupun sebagian para ulama mengenai ketidak mampuan perempuan untuk ikut berperan dalam dunia politik karena dianggap itu bukanlah keahliannya dan tidak mampu jika harus ikut terjun dalam mengurus urusan pemerintahan terutama mengatur Negara. Kedua, kurangnya ketertarikan kaum perempuan itu sendiri untuk ikut berperan didunia politik. Padahal Negara telah mengatur mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu untuk menduduki jabatan pemerintahan melalui partai politik yang diatur dalam Undang-undang.

Perbedaan dan pembagian gender yang mengakibatkan termanifestasi dalam posisi subordinasi kaum perempuan dihadapan laki-laki.¹³ Subordinasi disini berkaitan dengan politik terutama

¹²Sudarman, *Implikasi sensitivitas Gender dalam Perspektif Islam dalam mengenal tindakan kekerasan TKW*, (Bandar Lampung: LP2M, 2015), h. 14.

¹³Siti Muri'ah, *Nilai-nilai pendidikan Islam dan wanita karir*, (Semarang: Rasail Media Grup, 2011), Cet. Ke-1, h. 59.

menyangkut soal proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan. Meskipun jumlahnya 50% dari penduduk bumi, namun posisi kaum perempuan ditentukan dan dipimpin oleh kaum laki-laki. Subordinasi tersebut tidak saja secara khusus terdapat dalam birokrasi pemerintahan, masyarakat maupun pada masing-masing rumah tangga, tetapi juga secara global. Banyak sekali contoh khusus baik dalam tradisi, tafsir keagamaan, maupun dalam aturan birokrasi dimana kaum perempuan diletakkan dalam posisi yang lebih rendah dari kaum laki-laki.¹⁴ Dilihat dari tradisi masyarakat, perempuan dan laki-laki diberikan peran yang berbeda yaitu perempuan lebih berada pada sektor domestik sedangkan laki-laki berada pada sektor publik. Sehingga membuat perempuan sulit untuk bisa berkarir apalagi sampai berkiprah dalam politik untuk mengurus khalayak ramai. Sedangkan jika dilihat dari hukum Islam, terdapat sebagian ulama yang menolak dan memperbolehkan perempuan untuk berkiprah dalam politik. Yaitu:

1. Kelompok yang menolak, dengan berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi seperti Q.S. Al-Ahzab/: 33, yang menjelaskan bahwa tempat yang paling cocok bagi perempuan adalah di rumah dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakar yang mengatakan: *Lan yuflaha qaum*

¹⁴Mansour fakih, *analisis gender & transformasi social*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. Ke-1, h. 147.

wallauw amrohum imra'at (tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan)

2. Kelompok yang memperbolehkan, dengan berdasarkan Q.S. An-Nisa': 1, yang menjelaskan bahwa asal penciptaan manusia laki-laki dan perempuan adalah sama, sehingga tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian Q.S. At-taubah: 71, tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Q.S. Al-Hujurat: 13, yang menjelaskan posisi semua manusia, laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah dan yang membedakan diantara mereka hanyalah taqwanya. Hadits Nabi SAW, yang artinya: "sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi manusia lainnya". Hadits ini memberikan motivasi kepada manusia yaitu laki-laki dan perempuan agar berlomba-lomba melakukan pekerjaan dalam bidang apasaja yang bermanfaat bagi orang banyak sehingga setiap orang dipacu untuk berprestasi.

Dari beberapa pendapat tersebut, memperlihatkan bahwa saat ini peran perempuan untuk bisa berkiprah dalam politik itu masih sangat sulit dan masih diberikan batasan. Oleh karena itu, yang memiliki peran penting untuk membantu perempuan supaya dapat berkiprah dalam politik melalui partai politik.

Partai politik merupakan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹⁵ Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik adalah wadah atau tempat untuk mengaspirasikan suara rakyat dan hak-hak politik warga Negaranya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik yang berbasis Islam di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan di Jakarta pada 09 Jumadil 'Ula 1423 yang bertepatan dengan 20 April 2002, merupakan pelanjut dari Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta pada hari senin, 26 Rabiul Awal 1419 H yang bertepatan dengan 20 juli 1998. Dalam sebuah konferensi pers di aula Masjid Al-Azhar. Presiden atau ketua partai ini adalah Nurmahmudin Isma'il.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Merupakan fenomena sosial, politik dan keagamaan yang sangat menarik untuk dikaji dalam kerangka akademik.¹⁶ Kehadiran PKS dalam ranah politik telah memberikan nuansa baru yang kontroversi. Sebuah partai yang menjadikan Islam sebagai asas partai sekaligus ideologi politiknya. Salah satu tujuan partai ini adalah mengajak umat Islam menjalankan ajaran Islam dalam keseluruhan aspek kehidupannya, baik keagamaan, kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, sistem politik, hingga sistem keNegaraan.

¹⁵ A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 193.

¹⁶ Dendi Sutarto, *Perempuan dalam politik Partai Keadilan Sejahtera*, (Yogyakarta: Titah Syurga, 2013), Cet. Ke-1, h.1.

Dalam konteks ini, PKS sebagai gerakan sosial politik, lebih mempunyai makna bahwa politik tidak hanya dipersepsikan sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum. Di situlah, makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah. Relasi PKS antara dakwah dan politik seringkali menjadi perbincangan yang cukup kontroversi, disatu sisi sebagai gerakan dakwah yang mengusung nilai-nilai kesucian, sedangkan disisi lain PKS sebagai gerakan politik yang menjadikan Islam sebagai basis ideologi yang harus diperjuangkan. Terlepas dari kontroversi tentang hubungan Islam dan politik, satu hal yang menjadi catatan penting secara operasional adalah hubungan Islam dan politik bersifat organik atau tidak dapat dipisahkan. Sehingga corak hubunganpun secara struktural lebih diikat oleh sistem religious politik Islam yang formal, atau bisa dibilang sebagai Islam politik. Kemudian hubungan Islam dan politik dipandang sebagai dua hal yang secara formal saling berkaitan. Kemudian simbolisme politik Islam yaitu ideologi Islam, partai politik Islam, dan unsur-unsur formal lain yang membentuk batang tubuh politik Islam menjadi penting.

Dari asumsi diatas, sistem, struktur dan budaya politik PKS merupakan manifestasi dari ajaran agama yang dipahami. Ini berimplikasi pada relasi politik yang terbentuk melalui kultur politik,

dan pemaknaan politik antara anggota laki-laki dan perempuan.¹⁷

Muncul ketimpangan makna bagi kaum perempuan dalam wacana politik, terkait soal keadilan dalam mendapatkan hak, akses, peran, fungsi, kesempatan dan keadilan dalam ranah politik.

Dari penjelasan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konsistensi PKS sebagai partai Islam dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan untuk dapat berkiprah dalam politik sebagaimana dijelaskan diatas terdapat pro kontra akan hal tersebut. Dengan melihat konsepsi dan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan PKS.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka perlu adanya rumusan masalah yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimanakah konsep dan platform PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk kegiatan PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep dan platform PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara.

¹⁷*Ibid.*, h. 3.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian:

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

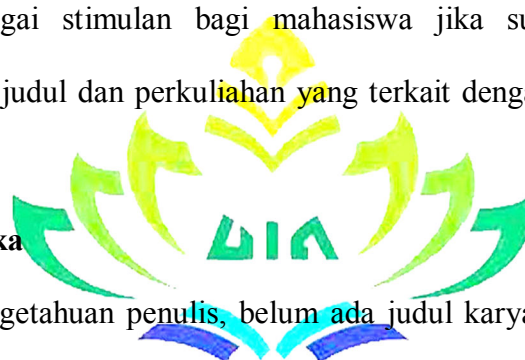
Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan untuk menambah khasanah keilmuan tentang kiprah politik perempuan, terutama yang berkaitan tentang konsistensi PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan. Buku-buku yang dapat di baca antara lain: Perempuan dalam politik PKS, kiprah politik Muslimah, dan buku lainnya yang berkaitan dengan perempuan dalam dunia politik.

2. Secara Praktis

Sebagai stimulan bagi mahasiswa jika suatu saat ada yang membahas judul dan perkuliahan yang terkait dengan pembahasan judul ini.

G. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada judul karya ilmiah yang serupa dengan judul skripsi ini. Akan tetapi, jika karya ilmiah yang membahas permasalahan yang serupa pernah penulis temukan, untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil



penelitian dalam permasalahan yang serupa dan lebih terbit terlebih dahulu diantaranya:

1. Suksesi Kepemimpinan dalam pandangan PKS oleh Ragil Sapto Wibowo Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah tahun 2011. penelitian ini membahas tentang suksesi kepemimpinan dalam perspektif Islam dan demokratisasi pemilihan kepemimpinan dalam Partai Keadilan Sejahtera, studi kasus di DPP PKS.
2. Peran Fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun kesadaran politik umat Islam di Bandar Lampung oleh Diana Febriandra IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin jurusan pemikiran politik Islam 2008 penelitian ini yang berstudi kasus di DPW PKS Kota Bandar Lampung, kajian penelitian ini lebih fokus pada peranan fungsionaris PKS Kota Bandar Lampung dalam membangun kesadaran politik umat Islam dan untuk mengetahui faktor penghambat serta pendukung dalam membangun kesadaran politik umat Islam di Bandar Lampung.
3. Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Lebak oleh Nurmalina UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah 1431 H/2010 M dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran PKS dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Lebak.
4. Pelaksanaan fungsi partai politik oleh Partai Keadilan Sejahtera studi kasus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sleman oleh

Nurmasita Alhadi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan 2009 dalam penelitian ini fokus pada fungsi partai politik sebagai fungsi sosialisasi politik, rekrutmen, pengelola konflik, komunikasi politik, agregasi dan artikulasi kepentingan dan partisipasi politik serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi dalam partai politik di kabupaten sleman.

5. Aktualisasi visi sejahtera Partai Keadilan Sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus oleh Shoma Fajar Rohmah Universitas Negeri Semarang Fakultas ilmu sosial jurusan hukum dan kewargaNegaraan 2011 dalam penelitian ini lebih fokus pada aktualisasi visi sejahtera Partai Keadilan Sejahtera dan faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat aktualisasi visi sejahtera Partai Keadilan Sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus.

Dari semua judul tersebut terdapat persamaan dengan karya penulis yaitu sama-sama membahas tentang PKS, sedangkan perbedaannya dengan judul Konsistensi PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan (studi pada: DPD PKS Lampung Utara). Dengan mengkaji mengenai kesungguhan PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan seperti perempuan dalam kiprah politik, perempuan dalam struktur partai, kiprah perempuan dalam berdakwah. Upaya pihak yang berwenang dalam hal ini adalah ketua dari Dewan pimpinan Daerah, serta ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang akan dijelaskan pada paparan penelitian ini:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “*field research*”. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat.¹⁸ Proses penelitian ini yaitu dengan mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan dalam hal ini adalah berkenaan dengan kiprah perempuan dalam ranah politik yang masih menjadi perdebatan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dengan mengusung judul konsistensi PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif* yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.¹⁹

46. ¹⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.

¹⁹Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 63.

Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan konsistensi PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara.

2. Sumber data

Proses penelitian kualitatif lebih mementingkan kualitas data dan proses kegiatan objek yang diteliti, oleh karenanya memerlukan data yang benar-benar memahami masalah penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.²⁰ Dalam hal ini penulis menjadikan ketua DPD PKS (Agung Utomo), wakil ketua umum (Muhammad Alfian), Sekretaris umum (Muhammad Nuzul Setiawan) dan ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga (Nanik Masrurin) sebagai responden dalam mencari data-data yang diperlukan serta dokumen-dokumen yang diperlukan berupa AD/ART partai, Platform, dokumentasi kegiatan, dan hal lain yang dibutuhkan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinal.²¹ Atau data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga

²⁰M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 81.

²¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. Ke-7, h. 50.

yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.²² Data sekunder juga merupakan data pendukung yang fungsinya memperkuat data primer, yang diperoleh dari buku-buku, literature seperti buku perempuan politik di parlemen, kesenjangan gender, perempuan dan politik, perempuan dalam politik Partai Keadilan Sejahtera. Serta karya-karya, dokumentasi, dan masyarakat terkait objek penelitian, berdasarkan penjelasan ini maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat perempuan di Lampung Utara.

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena data yang ada di lapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3. Metode pengumpulan data

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, berupa bercakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²³ Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari

²²M. Iqbal Hasan, *Op. Cit.* h. 81.

²³Nasution, *metode research penelitian ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet. Ke-8, h.

responden. Dalam hal ini penulis menggunakan interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederatan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.²⁴ Teknik ini memberikan peluang yang wajar kepada responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam.

Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara tidak terpimpin dan terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.²⁵

Interview dibedakan kedalam dua macam, yaitu pertama responden dan yang kedua informan. Responden adalah sumber data primer sebagai objek sasaran penelitian, sedangkan informan ialah sumber data sekunder, data dari pihak lain tentang responden.²⁶

Wawancara didalamnya terdapat alat pengumpulan data yang disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 145-146.

²⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian, Op.Cit*, h. 85.

²⁶Abdurrahmat Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 105.

Wawancara ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai Agung Utomo selaku ketua DPD PKS Lampung Utara, Muhammad Alfian selaku wakil ketua umum, Muhammad Nuzul Setiawan selaku sekretaris umum serta Nanik Masrurin selaku ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga di DPD PKS Lampung Utara, serta beberapa masyarakat perempuan di Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (*paper*), tempat (*place*) dan kertas atau orang (*people*). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.²⁷ Dengan demikian, metode dokumentasi adalah sumber data tentang informasi yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk tulisan maupun foto-foto yang dibutuhkan. Melalui data dokumentasi ini penulis memperoleh data yang bersifat dokumentatif yaitu berupa AD/ART partai, platform, dan keputusan organisasi partai mengenai aturan yang berkaitan dengan kebijakan yang

²⁷*Ibid.*, h. 149.

dibuat oleh Partai Keadilan Sejahtera tentang keikutsertaan perempuan dalam bidang politik.

c. Observasi

Menurut Kartini Kartono metode observasi adalah pengamatan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁸ Menggunakan metode ini, penulis dapat berhubungan dengan objek peneliti sehingga data yang diperoleh mempunyai sifat objektif. Metode observasi terbagi menjadi dua yaitu:

a) Participant observation

Dalam Participant observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari atau situasi yang diamati sebagai sumber data.

b) Non participant observation

Berlawanan dengan participant observation, non participant observation merupakan observasi yang penelitiannya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.

Penulis dalam hal ini menggunakan jenis non participant observation, yaitu observasi yang tidak melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan pengamatan lapangan.²⁹ Data yang diperoleh melalui observasi diantaranya mengenai foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh PKS dalam usaha untuk

²⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 136.

²⁹ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Bumi Aksara, 1995), h. 56.

merealisasikan kebijakannya terhadap perempuan yaitu dengan melibatkan peran perempuan dalam bidang politik.

d. Analisis data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan kemudian data-data tersebut diolah sebagai laporan. Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif adalah menguraikan hasil penelitian secara rinci apa adanya.³⁰ Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, Berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik ke generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.



³⁰Nana sujana, *tuntunan penulis karya ilmiah*, (Jakarta: Sinar baru algensindo, 1987), h. 76.

BAB II KONSISTENSI DAN HARKAT MARTABAT PEREMPUAN

A. Konsistensi

1. Pengertian konsistensi

Konsistensi berasal dari kata konsisten yang bermakna tidak berubah-ubah, taat asas, komitmen serta teguh pendirian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsisten adalah ketetapan atau kemantapan dalam bertindak.³¹

Konsisten juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terutama tindakan ini dilakukan agar adil dan akurat. Konsisten juga dapat diartikan sebagai argument atau ide yang tidak mengandung kontradiksi sedikitpun. Namun konsisten juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang konstatibel atau di sepakati berhubungan dengan sesuatu.³²

Makna konsisten seorang muslim terhadap Islam dan syari'atnya, menjadikan seorang muslim tersebut sebagai seorang muslim yang ideal. Konsisten seorang muslim terhadap syari'at Islam sebagaimana tersirat dalam surat Al-Asr yaitu dimanifestasikan dalam bentuk: mengimani syariat Islam, memahami syariat Islam, mengamalkan syariat Islam, mendakwahkan syariat Islam, sabar atau teguh dalam melaksanakan syariat Islam.³³

Konsisten dalam politik suatu tindakan yang dilakukan terus menerus untuk taat terhadap asas, keinginan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*,... .., *Op.Cit.* h. 611.

³²<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-konsisten-dan-contohnya/> diunggah pada tanggal: 17 April 2017.

³³Didiek Ahmad Supadi, *et al.*, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke- 1, h. 6.

kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi.³⁴ Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi.

Konsisten dalam partai PKS ciri setiap muslim harus berpegang teguh pada ajaran dan aturan Islam, yang menjadi inspirasi setiap gerakannya. Konsekuensinya, program dan langkah-langkah operasional partai harus konsisten pada hukum transenden yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat kauniyah), dalam kitab-kitabnya (ayat-ayat Qauliyah) dalam sunah Rasulullah saw, dalam konsensus umat, dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap permasalahan yang benar-benar tidak diketemukan secara tekstual dalam risalah orisinil (Al-Qur'an al-sunnah), konsistensi menuntut kontinuitas (al-istimrar) dalam gerakan dapat dipahami adanya keseimbangan antara kebijakan dan program.³⁵

2. Bentuk-bentuk konsistensi

Menurut sebagian ulama konsisten itu terjadi secara lahir maupun batin, yang dimaksud konsisten secara lahir adalah patuh terhadap Allah SWT dengan menebar *amar ma'ruf nahi munkar* sedangkan yang dimaksud konsisten secara batin adalah iman dan membenarkan adapun bentuk-bentuk konsisten adalah sebagai berikut:

³⁴Soekidjan Soegiyarto, *Komitmen organisasi sudahkah menjadi bagian dari kita?*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 3.

³⁵Dendi Sutarto, *Op. Cit.* h.78.

- a. Konsisten dalam memegang teguh aqidah dan tauhid.
- b. Konsisten dalam menjalankan syariat agama, baik berupa perintah maupun larangan.
- c. Konsisten dalam bekerja dan berkarya, dengan tulus dan ikhlas karena Allah swt.
- d. Konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.³⁶

Adapun hubungan antara konsisten atau istiqamah, komitmen dan konsekuen, diantaranya sebagai berikut:

a. Istiqamah

Istiqamah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan dalam makna yang luas istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman. Akar kata istiqamah dari kata *qooma* yang berarti berdiri. Maka secara etimologi, istiqamah berarti tegak lurus. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istiqamah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen.

b. Komitment

Menurut soekidjan, komitmen adalah kemampuan dan kemauan. Segala komitmen yang kita berikan kepada orang lain biasanya berkaitan langsung dengan kebutuhan kita pada waktu itu. Komitmen itu menyangkut disiplin diri untuk memenuhi kebutuhan orang lain pula,

³⁶Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Istiqamah konsekuen dan konsisten*, (Jakarta: Pustaka al Taqwa, 2004), h. 5.

biasanya untuk masa yang lama. Ikatan masa yang lama itu menuntut pemikiran secara sadar tentang tanggung jawab dan fungsi.

c. Konsekuensi

Konsekuensi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan. Konsekuensi ini dampak yang terjadi jika suatu keputusan yang diambil, dampak ini bersifat positif maupun negatif terhadap orang, situasi, sistem. Konsekuensi artinya hal-hal yang timbul sebagai akibat atas sebuah pilihan serta keputusan.³⁷

3. Konsisten dalam al-Qur'an dan Hadits

Konsisten dapat diartikan sebagai istiqamah terhadap agama. Istiqamah memiliki arti konsisten dalam melakukan kebaikan, teguh dalam suatu pendirian.

Adapun ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang istiqamah adalah Q.s Fushilat ayat 30-32:



إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ لَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang Telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

³⁷Muhammad Imarah, *Islam dan pluralitas*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 42.

Hadits Rasulullah yang artinya: “*Aku berkata: “Wahai Rasulullah katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Beliau bersabda: “Katakanlah, Aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah (jangan menyimpang).”*”³⁸

Dari penjelasan ayat Al-Quran serta hadits tersebut maka konsisten dalam Al-Qur'an dan hadits dapat diartikan sebagai keteguhan seorang hamba dalam ajaran agama Islam, PKS adalah partai dakwah yang berideologikan Islam. Dengan dakwah di dalam masyarakat sosial menebar *Amar ma'ruf nahi munkar* secara konsisten akan mampu menjadikan PKS sebagai teladan yang baik bagi masyarakat.

B. Harkat dan martabat perempuan

1. Pengertian harkat dan martabat perempuan

Harkat adalah nilai manusia sebagai makhluk Allah SWT, yang dibekali daya cipta, rasa, dan karsa serta hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) harkat adalah derajat, kemuliaan.³⁹

Kata martabat memiliki paralelisme makna dengan makna kata bahasa Latin (*dignitas*) yang berarti ”harga tinggi, nilai tinggi, kemegahan dan kemuliaan”. Kata ini diturunkan dari kata kerja *dignitare* yang berarti ”menganggap layak atau menganggap layak menjadi”. Sedangkan bentuk adjektifnya adalah *dignus*, yang berarti ”patut, layak, pantas, dan selaras”.⁴⁰ Martabat menurut Miriam

³⁸Yazid Bin Abdul Jawas, *Op. Cit.*

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia...*, ... *Loc. Cit* h. 484.

⁴⁰Fransiskus sales lega, “Martabat Manusia dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant”, Jurnal, (Ruteng: Teologi STKIP), h. 87.

budiardjo adalah setiap manusia berhak menjaga harga dirinya karena setiap manusia sudah memiliki hak yang melekat sejak lahir dan terbawa dalam kehidupan bermasyarakatnya. Jadi, martabat manusia adalah kelayakan atau kepantasan menjadi manusia atau tingkatan dari harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Martabat manusia, yang menunjukkan dirinya dalam posisi (kedudukan) lebih tinggi, dan lebih mulia dari makhluk yang lain, tentu saja tidak dimaksudkan menjadi alat pembenaran dari tindakan-tindakan destruksi (menghancurkan) yang bertentangan dengan harkat manusia itu sendiri.⁴¹

Ajaran agama dengan tegas menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang berkedudukan lebih tinggi dari makhluk yang lain. Derajat yang tinggi dari manusia, selain mensyaratkan perlunya penghormatan atas sesama manusia, sesungguhnya juga mengandung unsur kewajiban dari manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang justru dapat merendahkan martabatnya sendiri. Derajat ini pula menjadikan setiap manusia menjadi penting artinya, dimana tidak boleh ada suatu tindakan apapun yang bisa dibenarkan yang mengakibatkan diturunkannya derajat manusia oleh kepentingan atau tujuan apapun.⁴²

⁴¹Syahrudin Latief, *Jalan kemanusiaan*, (Yogyakarta: Lentera Putaka Utama, 1999), Cet. Ke-1, h. 31.

⁴²*Ibid.*,

2. Harkat dan martabat perempuan dalam pandangan Islam

Ketika Islam datang ke dunia ini, ia telah mengangkat posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi, memberikan kebebasan,⁴³ kehormatan dan hak pribadinya secara merdeka. Allah telah memberikan kepada perempuan hak untuk memilih baik dalam aqidah, pernikahan, dan semua sisi kehidupan lainnya.

Agama Islam mengajarkan bahwa masing-masing jiwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang senilai dengan manusia sejagad. Masing-masing pribadi manusia mempunyai nilai kemanusiaan universal. Maka, kejahatan kepada seorang pribadi adalah sama dengan kejahatan kepada manusia sejagad, dan kebaikan kepada seorang pribadi adalah sama dengan kebaikan kepada manusia sejagad. Inilah dasar yang amat tegas dan tandas bagi pandangan kewajiban manusia untuk menghormati sesamanya dengan hak-hak asasinya yang sah.

Islam mengangkat harkat perempuan. Saat ini perempuan hidup sebagaimana layaknya manusia. Dia terhormat seperti laki-laki tidak ada lagi manusia yang meragukan kemanusiaan perempuan atau perdebatan hakekatnya. Perempuan sama dengan laki-laki dalam hal rohnya, nilainya, hak-haknya, dan kemanusiaannya. Ini semua berkat datangnya agama Islam yang berhasil menghancurkan tradisi-tradisi usang dan menentang keras penghinaan terhadap hak-hak perempuan.⁴⁴

⁴³Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Ke-3, h. 109.

⁴⁴Achmad Santori Ismail, *Golput haram golput halal*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2014), Cet. Ke-1, h. 155.

Islam mengajarkan persamaan harkat umat manusia tidak ada faktor yang menjadi penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu atas lainnya. Kecuali peringkat iman dan ketakwaannya manusia yang mencapai derajat *muttaqin* akan memperoleh posisi tinggi di sisi Allah, tanpa melihat jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan.

Esensi ajaran kesetaraan ini sering menjadi bias ketika pemahaman ajaran Islam telah terkontaminasi dengan kerangka berfikir patriarkis sehingga pandangan yang berbeda tentang status dan kedudukan perempuan yang dinilai lebih rendah dari pada laki-laki. Adanya peluang perempuan untuk mengembangkan diri, sama dengan laki-laki maka zaman keemasan Islam, banyak di temukan perempuan-perempuan memiliki kecerdasan dan kelebihan yang setara, bahkan melebihi laki-laki, perempuan dari komunitas agama lain, seharusnya berterimakasih kepada umat Islam, Islam membawa ajaran memuliakan harkat dan martabat kaum perempuan sehingga kaum perempuan bisa bangkit untuk menunjukkan diri setaraf dengan kemajuan yang telah dicapai oleh kaum laki-laki.⁴⁵

Al-Qur'an telah membahas masalah perempuan dalam sepuluh surat lebih, seperti surat Al-Baqarah, Al-Maaidah, An-Nur, Al-Ahzaab, Al-Mujaadilah, Al-Mumtahanah, At-Tahriim dan dalam dua surat yang sering disebut dengan surat An-Nisaa' Al-Kubro (yaitu: Qs. An-Nisaa') dan An-Nisaa' As Sughro (yaitu Qs. At Tholaaq). Ini

⁴⁵Al Maarif, "Karakteristik wanita mulia dan wanita tercela" Skripsi, (Bandar Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 17. t.d.

menunjukkan perhatian khusus yang diberikan Al-Qur'an kepada perempuan.⁴⁶ Hal ini telah membuktikan bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan.

3. Kedudukan perempuan dalam politik

Masalah pemberdayaan perempuan dalam konteks masyarakat Indonesia menyimpan suatu problem, yakni adanya ketidak seimbangan hasil yang dicapai dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia antara laki-laki dan perempuan.⁴⁷ Perempuan adalah kelompok yang disisihkan secara politik, karena itu seharusnya kondisi ketidakadilan diperlihatkan lengkap dengan konteks dan latar sosiologisnya.⁴⁸ Minimnya jumlah perempuan di dunia politik formal bila dikaitkan dengan kecenderungan kultural masyarakat, sangat terkait dengan persoalan pemahaman keagamaan.⁴⁹ Kentalnya pandangan kultural masyarakat mengenai perempuan, sangat terkait dengan wajah Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia.

Kedudukan perempuan dalam politik, terutama di era demokrasi saat ini, cukup strategis dan secara teoritis memiliki peran yang sama dengan laki-laki, namun demikian, dalam dinamika kehidupan sosial tidak bisa dinafikan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah banyak mempengaruhi kehidupan kaum

⁴⁶*Ibid.*,

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Meretas kebekuan ijtihad*, (Jakarta: PT.Ciputat Press), Cet. Ke-2, h.169.

⁴⁸Gadis Arivia, *et al*, *Catatan perjuangan politik perempuan*, (Jakarta: Yayasan jurnal perempuan, 2004), h. 104.

⁴⁹MB. Wijaksana, *et al*, *Politik dan keterwakilan perempuan*, (Jakarta: Yayasan jurnal perempuan, 2004), Cet, Ke-1, h.36.

perempuan dan anak-anak. Akibat krisis itu antara lain tingginya angka kematian ibu dan bayi, buruknya kondisi kesehatan anak, meningkatnya arus pekerja migran perempuan serta meningkatnya angka *drop-out* sekolah-sekolah dan angka pengangguran khusus perempuan.⁵⁰

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif menyebabkan banyak kebijakan yang dihasilkan tidak sensitif gender.⁵¹ Dampak buruk itu telah meningkatkan kesadaran tentang perlunya menyusun sebuah agenda politik yang lebih peka gender (*gender sensitive*). Kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan gender. Keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan hal yang sangat penting, karena diyakini dapat memberikan perubahan positif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat.⁵²

Bertolak dari pemikiran diatas dapat ditegaskan bahwa kebutuhan untuk meningkatkan keterwakilan politik kaum perempuan di Indonesia berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik harus dirombak, dan semua itu mustahil dapat dicapai dengan sistem politik tradisional. Jika kaum perempuan mau tampil kedepan dan memegang posisi publik, niscaya mereka akan

⁵⁰Sidi Ritauddin, *Kesenjangan Gender*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), Cet. Ke-1, h. 31.

⁵¹Gadis Arivia, *et al*, *Catatan perjuangan politik perempuan*, *Op. Cit.* h. 36.

⁵²Sidi Ritauddin, *Op. Cit.*

mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai sosial dan ekonomi baru yang sesuai dengan kepentingan mereka. Meningkatkan keterwakilan politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang akan menjamin hak-hak kelompok perempuan dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dari berbagai hasil kajian terdahulu mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menghambat peran serta kaum perempuan, sekaligus mengusulkan beberapa strategi untuk mengurangi dan sebisa mungkin menghilangkan persoalan-persoalan itu.

Faktor-faktor itu dapat dikategorikan ke dalam bidang politik, sosial ekonomi, ideologi dan psikologi. Faktor-faktor politik adalah kurangnya dukungan parpol terhadap perempuan. Secara lebih spesifik, sistem politik dan partai-partai politik Indonesia dinilai sangat tidak peka gender, akibatnya kaum perempuan berikutan isu-isu yang menyangkut diri mereka menjadi diremehkan. Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya tempat menjadi ibu rumah tangga dan tidak cocok untuk berperan aktif dalam fungsi publik di masyarakat, apalagi aktor politik. Pemikiran ini jelas sangat membatasi peluang perempuan untuk berperan aktif di panggung politik. Tidak hanya itu,

kinerja parpol Indonesia pun dianggap sebagai salah satu kendala terbesar terhadap peran serta perempuan.⁵³

Kedudukan perempuan menurut UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya sebagai warga Negara Indonesia. Disitu antarlain disebutkan persamaan hak dalam memperoleh lapangan pekerjaan, kehidupan yang layak, pendidikan, pelayanan hukum, hak berserikat dan berkumpul serta persamaan hak dalam mengeluarkan pendapat.⁵⁴

Pasal 27:(1) segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 29:(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30:(1) tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. Pasal 31:(1) tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.⁵⁵ Prinsip persamaan antara laki-laki telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 27 dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang telah

⁵³ *Ibid.*, h. 33.

⁵⁴ Muhammad Koderi, *Bolehkah wanita menjadi imam Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet. Ke-1, h. 45.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 46.

diratifikasi melalui UU No.7 tahun 1984. Dalam konvensi ini partisipasi politik perempuan diatur dalam pasal 7 yang antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Jaminan sesama hak untuk memilih dan dipilih
2. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintah, dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.
3. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan.
4. Perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik Negara.⁵⁶

Untuk memberikan pengertian tentang hak-hak politik, maka ada baiknya dijabarkan lebih dahulu pengertian hak dan politik itu sendiri.⁵⁷ Kata hak berasal dari bahasa arab *al-haqq* yang berarti menetapkan, menguatkan adapun kata politik berasal dari bahasa arabnya *as-siyasah* (السياسة) merupakan *masdar* dari kata *sasa yasusu* (ساس يسوس) yang pelakunya *sa'is* (سائس). Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁵⁸

⁵⁶Tri Marhaeni Pudji Astuti, "Citra perempuan dalam politik", Jurnal, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2008), h. 4.

⁵⁷Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997) h. 282.

⁵⁸Miriam Budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 8.

Hak politik menurut para ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan seorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik, seperti hak memilih (dan dipilih), mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam Negara, atau hak politik adalah hak-hak di mana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah Negara atau memerintahnya.

Islam menetapkan hak-hak politik tiap individu, di antaranya:

1. Hak memilih

Semua individu memiliki hak memilih kepala Negara dan anggota-anggota majelis syuro' (permusyawaratan). Siapa yang terpilih untuk jabatan ini, maka ia adalah kepala Negara, dalam syara' disebut bai'ah dan hak bai'ah ini adalah tiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.

2. Hak Musyawarah

Hak musyawarah adalah bagi tiap muslim kepada seseorang khalifah, tiap muslim memiliki hak untuk ikut musyawarah di dalam urusan-urusan yang perlu di musyawarahkan oleh khalifah.⁵⁹

3. Hak pengawasan

Tiap individu memiliki hak pengawasan kepala Negara dan seluruh pejabat dalam pekerjaan dan tingkahlaku mereka yang menyangkut urusan Negara. Hak pengawasan ini dimaksudkan untuk meluruskan kepemimpinan apabila ia menyimpang.

⁵⁹Saefuddin, *Ijtihad politik cendekiawan muslim*, (Jakarta: Gema insani press, 1996), h. 17.

4. Hak pemecatan

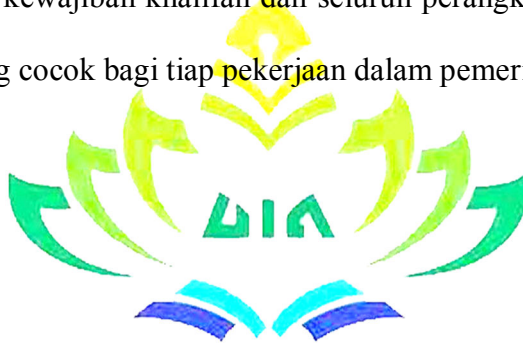
Islam telah memberi hak kepada umat memecat atau memberhentikan seorang khalifah, jika dia keluar dari persyaratan seorang khalifah atau tidak melaksanakan tugas dengan baik, atau karena ketidak mampuan. Hal ini telah ditegaskan para ahli fiqih, diantaranya Imam Ibnu Hazmi Adz-Dzohiridan Ibnu Rajab Al-Hambali.

5. Hak pencalonan dalam pemilihan

Hak pencalonan adalah seorang mencalonkan dirinya untuk salah satu jabatan pemerintah atau fungsi umum. Apakah individu memiliki hak ini dalam kepemimpinan Islam? Jawabannya boleh, karena Rasullullah SAW telah mengabulkan permintaan Amru Ibnu Ash ketika dia memohon menjadi wali di wilayah oman.⁶⁰

6. Hak menduduki jabatan

Memegang jabatan menurut syariah Islam bukan hanya hak individu, melainkan kewajiban khalifah dan seluruh perangkatnya memilih orang yang paling cocok bagi tiap pekerjaan dalam pemerintahan.⁶¹



⁶⁰*Ibid.*, h. 19.

⁶¹*Ibid.*,

BAB III

SEJARAH LAMPUNG UTARA DAN STRUKTUR DPD PKS DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. Lampung Utara

1. Sejarah berdirinya Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu Kabupaten tertua dari 15 Kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Lampung dengan ibukota Kotabumi. Kabupaten yang dikenal dengan Bumi Ragem Tunas Lampung ini berjarak sekitar 112 KM dari Bandar Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung.⁶²

Pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1945, Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Karesidenan Lampung yang terbagi atas beberapa kawedanan, Kecamatan dan marga.

Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 Desember 1952 Nomor 153/1952 dan dibentuklah “Negeri” yang menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan di bawah Kecamatan. Dengan terjadinya pemekaran beberapa Kecamatan, terjadilah suatu negeri di bawah beberapa Kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan negeri dan kawedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU RI Nomor 18 Tahun 1965.

Berdasarkan UU RI Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, juncto UU RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

⁶²Selayang Pandang Kabupaten Lampung Utara, 2017. h. 1.

dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 km² kini tinggal 2.765,63 km². Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 1991, sehingga Wilayah Lampung Utara berkurang 6 Kecamatan yaitu: Sumber Jaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara.

Pemekaran kedua terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1997. Wilayah Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 Kecamatan yaitu: Menggala, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 1999. Lampung Utara kembali berkurang 6 Kecamatan yaitu: Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui. Kabupaten Lampung Utara, saat ini tinggal 8 Kecamatan yaitu: Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning.

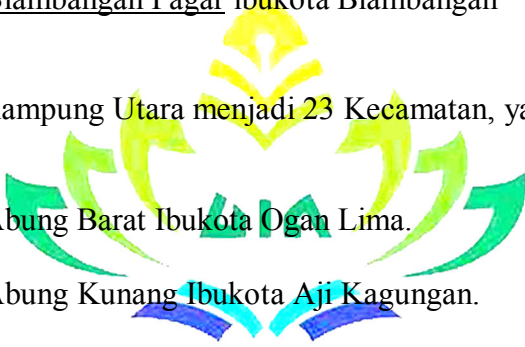
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 jumlah Kecamatan dimekarkan menjadi 16 Kecamatan dengan mendefinitifkan 8 Kecamatan

pembantu yaitu: Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bunga Mayang dan Muara Sungkai. Sedangkan hari kelahiran Kabupaten Lampung Utara, setelah melalui berbagai kajian, disepakati jatuh tanggal 15 Juni 1946 dan ini disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 telah dimekarkan kembali 7 Kecamatan yang baru, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Hulu Sungkai ibukota Gedung Makripat
2. Kecamatan Sungkai Tengah ibukota Batu Nangkop
3. Kecamatan Sungkai Barat ibukota Sinar Harapan
4. Kecamatan Sungkai Jaya ibukota Cempaka
5. Kecamatan Abung Pekurun ibukota Pekurun
6. Kecamatan Abung Kunang ibukota Aji Kagungan
7. Kecamatan Blambangan Pagar ibukota Blambangan

Sehingga saat ini di lampung Utara menjadi 23 Kecamatan, yaitu:

- 
1. Kecamatan Abung Barat Ibukota Ogan Lima.
 2. Kecamatan Abung Kunang Ibukota Aji Kagungan.
 3. Kecamatan Abung Pekurun Ibukota Pekurun.
 4. Kecamatan Abung Selatan Ibukota Kalibalangan.
 5. Kecamatan Abung Semuli Ibukota Semuli Raya.
 6. Kecamatan Abung Surakarta Ibukota Tatakarya.

7. Kecamatan Abung Tengah Ibukota Negeri Besar.
8. Kecamatan Abung Timur Ibukota Bumi Agung.
9. Kecamatan Abung Tinggi Ibukota Ulak Rengas.
10. Kecamatan Blambangan Pagar Ibukota Blambangan.
11. Kecamatan Bukit Kemuning Ibukota Bukit Kemuning.
12. Kecamatan Bunga Mayang Ibukota Negara Tulangbawang.
13. Kecamatan Hulu Sungkai Ibukota Gedung Makripat.
14. Kecamatan Kotabumi Ibukota Kotabumi.
15. Kecamatan Kotabumi Selatan Ibukota Mulangmaya.
16. Kecamatan Kotabumi Utara Ibukota Madukoro.
17. Kecamatan Muara Sungkai Ibukota Negeri Ujungkarang.
18. Kecamatan Sungkai Barat Ibukota Sinar Harapan.
19. Kecamatan Sungkai Jaya Ibukota Cempaka.
20. Kecamatan Sungkai Selatan Ibukota Ketapang.
21. Kecamatan Sungkai Tengah Ibukota Batunangkop.
22. Kecamatan Sungkai Utara Ibukota Madukoro.
23. Kecamatan Tanjung Raja Ibukota Tanjung Raja.⁶³

Secara administratif, Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23

wilayah Kecamatan dan 232 Desa, 15 kelurahan dengan total luas wilayah 2.725,63 KM². Sementara itu jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara yang tercatat pada tahun 2017 sebanyak 602.727 jiwa.

⁶³Arsip, *Kabupaten Lampung Utara*, 07 Juli 2017.

Dan 45% diantaranya penduduk usia produktif yang sebagian besar menekuni profesi pada sektor pertanian.

Sedangkan letak Geografis Arah Utara-Selatan 4,340-5,060 Lintang Selatan, Arah Timur-Barat 104,300-105,080 Bujur Timur. Secara topografi, sebelah barat merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 450-150 m dari permukaan laut, pada bagian timur merupakan dataran rendah yang tertutup awan vulkanis.

Iklim tropis di Lampung Utara, dengan musim hujan dan musim kemarau berganti sepanjang tahun. Temperatur rata-rata 30°C, dengan jumlah hujan 197 mm/bulan dan hujan rata-rata 12 hari/bulan. Sedangkan sosial budaya masyarakat Kabupaten Lampung Utara dikenal sebagai masyarakat yang terbuka bagi kaum pendatang dan memiliki jiwa gotong royong yang dalam istilah Lampung “*Sakai Sembayan*” tradisi dan adat budaya di Kabupaten ini masih tumbuh dan berkembang karena selalu dipertahankan oleh masyarakat adat Lampung Utara. Hal ini tentu saja merupakan salah satu potensi pariwisata yang perlu dikembangkan. Sementara itu agama dan kepercayaan penduduknya lebih dari 97% beragama Islam, selebihnya beragama Kristen, Budha, Hindu, dan Khong Hucu. Namun toleransi

antar umat beragama di Kabupaten Lampung Utara cukup terpelihara dengan baik.⁶⁴

2. Pemerintahan

Dilihat dari pemerintahannya, sejak berdirinya Kabupaten Lampung Utara hingga saat ini telah dipimpin oleh bupati secara berturut-turut yaitu:

1. Pangeran Inggunan (1959-1960)
2. A. Somad (1960-1965)
3. M. Syarif (1965-1967)
4. Rivai (1967-1972)
5. TRA. Syukri (1972-1973)
6. Djuari Ahmad (1973-1978)
7. Masno Asmono (1978-1988)
8. Masno Asmono (1988-1993)
11. Jufri AH. Adam (1988-1993)⁶⁵
10. Ahmad Gumbira (1993-1998)
12. Hairi Fasyah (1998-2003)
13. Hairi Fasyah (2003-2008)
14. Hi. Zainal Abidin. MM (2008-2014)
15. Hi. Agung Ilmu Mangkunegara S.STP. M.H (2014-2019)

Sedangkan wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara:

1. Hi. Zainal Abidin. MM (2000-2003)

⁶⁴Selayang Pandang Kabupaten Lampung Utara, *Op. Cit.* h. 2.

⁶⁵*Ibid.*, h. 28.

2. Hi. Zainal Abidin. MM (2003-2008)
3. Hi. Rohimat Aslan (2008-2014)
4. Dr. Sri Widodo, S.pd, Finasim (2014-2019)

Berdasarkan selang pandang Bumi Ragem Tunas Lampung tahun 2017 pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, bahwa wakil bupati dimulai dari 4 priode terakhir yaitu pada tahun 2000 kepemimpinan Kairi Fasyah yang diwakili oleh Zainal Abidin pada tahun 2000 hingga Agung Ilmu Mangkunegara yang diwakili oleh Sri Widodo tahun 2014 hingga 2019 mendatang.

Dilihat dari bidang politik daerah, bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 19 November 2015, Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan hajatan besar, pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di 119 Desa Se- Kabupaten Lampung Utara. Penghargaan sebagai Daerah tertinggal yang telah terentaskan dari Kementerian Perdesaan Daerah Tertinggal R.I. penghargaan Adi Wiyata (peduli lingkungan) dari gubernur Lampung kepada SDN 4 Tanjung Aman, SMP 7 Kotabumi dan SMA 3 Kotabumi Bupati Agung Ilmu Mangkunegara diberikan penghargaan Bintang Legiun Veteran.

Dalam bidang politik Lampung Utara akan menggelar pesta demokrasi yakni pemilihan bupati dan calon bupati pada tahun 2018 mendatang. Berdasarkan surat salinan dari DPP yang bernomor surat

21/SKEP/DPP-PKS/1438. DPD PKS Lampung Utara resmi mendukung Agung Ilmu Mangkunegara sebagai calon pada pilkada mendatang. Diantara calon tersebut yaitu: Agung Ilmu Mangkunegara, Sri Widodo, Aprozi Alam, Yusrizal, Syaiful Dermawan, dan Nerozely Agung Putra.

Sementara itu dilihat dari bidang infrastruktur, seluruh masyarakat dan aparat pemerintahan memiliki peran yang besar dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Selama kepemimpinan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara sedikitnya 30 penghargaan yang telah diraih beliau untuk membuat Kabupaten Ragem Tunas Lampung ini menjadi lebih sejahtera dan makmur.⁶⁶ Perlu diketahui bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara saat ini mengalami peningkatan, dari 17 milyar naik menjadi 93 milyar dan kita harus menyadari bahwa dengan kewenangan dan anggaran yang lebih besar maka diharapkan pembangunan Kabupaten Lampung Utara semakin meningkat. Pada tahun 2017 ini Bupati Agung Ilmu Mangkunegara melakukan sinergi kerjasama untuk menargetkan 70% pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Utara sudah dalam kondisi baik.

⁶⁶*Ibid.*, h. 6.

3. Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh sektor pertanian. Hampir sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani khususnya tanaman keras seperti : kopi, lada, ubi kayu (singkong), kelapa sawit, karet, tebu dan lain-lain.

a. Pertanian dan perkebunan

Salah satu komoditas unggulan Kabupaten Lampung Utara pada tanaman pokok yaitu padi gogo dan padi sawah, dengan realisasi produksi mencapai 23.800 ton, sedangkan produksi padi sawah berkisar 145.450 ton. Dengan peningkatan produksi padi tersebut Kabupaten Lampung Utara menyumbang sekitar 7,45% dari total keseluruhan produksi padi di wilayah provinsi Lampung guna menopang program pemerintah pusat dalam mensukseskan swasembada pangan.⁶⁷

Selain padi Kabupaten Lampung Utara juga memiliki potensi tanaman pertanian seperti: ubi kayu/singkong dengan produksi mencapai 875.785 ton per tahun, Jagung 75.345 ton, kedelai 350 ton, ubi jalar/ketela rambat 4.235 ton dan kacang tanah 1000 ton.

Kabupaten Lampung Utara juga memiliki potensi perkebunan. Kebijakan penyelenggaraan urusan perkebunan diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas dengan pemanfaatan potensi sumber daya perkebunan. Lahan perkebunan Kabupaten Lampung

⁶⁷*Ibid.*, h. 7.

Utara berdasarkan statistik terdiri dari: luas perkebunan karet: 19.143 Ha, dengan produksi rata-rata 9.871 ton/tahun, kelapa luas lahan 2.638 Ha, dengan produksi rata-rata 1.819 ton/tahun. Kopi luas: 17.076 Ha dengan produksi rata-rata 604 ton/tahun, lada luas: 18.019 Ha, dengan produksi rata-rata 6.043 ton/tahun, cengkih luas 588 Ha dengan produksi rata-rata 28 ton/tahun, kelapa sawit luas: 8.035 Ha dengan produksi rata-rata 4.629 ton/tahun. Selain itu Kabupaten Lampung Utara juga memiliki potensi perkebunan tebu dengan luas 14.420 Ha dengan produksi rata-rata 24.902 ton/tahun dan kakao/coklat selus 3.533 dengan produksi rata-rata 956 ton/tahun. Dari keseluruhan tersebut merupakan perkebunan rakyat yang dikelola oleh rakyat serta perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta.⁶⁸

b. Peternakan

Pengembangan sektor peternakan merupakan salah satu potensi unggulan Kabupaten Lampung Utara dengan tujuan untuk mendukung upaya pemerintah pusat mencapai swasembada daging dengan luas lahan peternakan 2016/2017: kebun HMT 130,90 Ha dan padang penggembala 14,00 Ha. Sedangkan jumlah populasi ternak besar di Lampung Utara yang terbesar di beberapa Kecamatan yaitu sapi potong jantan 7.110 ekor dan betina 19.325 ekor total 26.435 ekor. Kerbau jantan 425 ekor, betina 1020 ekor jumlah 1445 ekor.

⁶⁸*Ibid.*, h. 8.

Sedangkan populasi ternak kecil di Kabupaten Lampung Utara tahun 2016/2017: kambing 60575 ekor, domba 5.125 ekor, dan kelinci 20325 ekor. Sedangkan populasi ternak unggas terdiri dari: ayam buras 514.597 ekor, ayam pedaging 1.535.685 ekor, ayam petelur 125.575 ekor, itik 10,357 ekor, entok 19.563 ekor, merpati 3.595 ekor, angsa 1.350 ekor, kalkun 3 ekor. Dari jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konsumsi ternak di Kabupaten Lampung Utara kiranya dapat terpenuhi, bahkan dari jumlah tersebut penjualan sapi, kerbau dan kambing juga dapat memenuhi kebutuhan ternak Kabupaten-Kabupaten terdekat. Guna mendukung operasional kawasan budidaya peternakan disediakan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) yang terletak di desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Lampung Utara dan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan di wilayah Kecamatan Sungkai Jaya, Abung Selatan dan Abung Tinggi.

c. Perikanan

Kabupaten Lampung Utara sangat potensial budidaya ikan tawar. Sektor perikanan ini memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan seiring dengan meningkatnya konsumsi ikan masyarakat. Potensi perikanan di Kabupaten Lampung Utara tahun 2016/2017 dengan luas area pemeliharaan, penangkapan, dan produk ikan yaitu:

- Keramba/Jaring Apung, luas 225 Ha dengan produksi rata-rata 3.235 ton/tahun.
- Waduk dengan produksi 585.850 ton/tahun.

-Rawa dengan produksi 290.740 ton/tahun.

Sungai, luas 12,27 Ha dengan produksi rata-rata 1.080.525 ton/tahun.

Kawasan ikan di Kabupaten Lampung Utara secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kawasan perikanan budidaya dengan komoditas unggulan berupa ikan nila gurame, patin dan ikan lele yang berlokasi di bendungan Way Rarem Kecamatan Abung Pekurun, Bendungan Tirtha Sinta Kecamatan Kotabumi Utara dan bendungan Way Tebabeng di Kecamatan Abung Selatan.
2. Kawasan Minopolitan dengan komoditas ikan mas, ikan nila, patin dan ikan lele terbesar di 4 Kecamatan yaitu: Kecamatan Kotabumi Selatan, Abung Semuli, Abung Selatan dan Kecamatan Abung pekurun.

Untuk mendukung operasional kawasan budidaya perikanan dan kawasan minopolitan disediakan prasarana perikanan berupa balai benih ikan (BBI) dengan benih ikan mas, ikan nila, ikan patin dan ikan lele berada di Kecamatan Tanjung Raja, Abung Semuli dan Kecamatan Abung Tinggi serta Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang berada di Kecamatan Abung Surakarta, Kotabumi Selatan dan Abung Tinggi.⁶⁹

d. Perdagangan

Pusat perdagangan di Kabupaten Lampung Utara pada umumnya didominasi oleh pasar-pasar tradisional yang terbesar di seluruh wilayah Kecamatan yang ada. Sementara pasar tradisional di wilayah Kotabumi kota pasar

⁶⁹*Ibid.*, h. 10.

pagi dan pasar sentral merupakan pusat perdagangan, selain itu terdapat pusat perbelanjaan modern yang berada di Ibukota Kabupaten Lampung Utara seperti Mall Plaza Ramayana Departement Store, toko-toko serba ada serta toko waralaba yang terbesar diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara dan hasil pertanian, perkebunan dan industri masyarakat juga turut menambah nilai tambah sektor perdagangan di Bumi Ragem Tunas Lampung.

e. Perusahaan daerah air minum payan mas

Perusahan air minum kemasan ‘payan mas’ merupakan salah satu badan usaha milik daerah Lampung Utara yang pediriannya perusahaan ini mengacu pada perda No.10 tahun 2016 tentang pembentukan perusaan PD Lampung niaga. Perusaan air minum ini didirikan diatas lahan seluas 1.000 meter persegi dengan modal perusahaan murni dari pemerintah daerah.

Perusahaan air minum milik pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara ini dengan kapasitas 7.000 liter/hari, air yang diambil menggunakan pompa bor untuk mengisi air minum kemasan itu sangat potensial untuk dikembangkan dan dipasarkan guna memenuhi kebutuhan air minum diseluruh wilayah Provinsi Lampung.

f. Home industri

Pertumbuhan dan perkembangan industri di Kabupaten Lampung Utara, baik industri kecil maupun industri besar menunjukkan peningkatan produksi yang cukup signifikan. Diantara industri besar yang menjadi produk unggulan Kabupaten Lampung Utara diantaranya produk tapioka dan crude palm oil dengan



daya saing yang cukup unggul untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan industri kecil di Lampung Utara diantaranya:

a. Keripik, yang produksinya tersebar hampir seluruh wilayah Kecamatan dengan didukung potensi Sumber Daya Alam yang cukup melimpah serta didukung dengan pemesanan yang baik sehingga produk keripik di Kabupaten Lampung Utara cukup dikenal dan tidak kalah bersaing dengan daerah lain.

b. Jamu, Kabupaten Lampung Utara terdapat juga industri jamu tradisional khususnya di wilayah Kecamatan Abung Semuli dengan didukung bahan baku yang cukup baik. Namun pemasaran hasil produksi industri jamu tersebut masih sangat sederhana sehingga kemampuan daya saing masih sangat kurang untuk menjangkau diluar wilayah Kabupaten Lampung Utara.

g. Produksi tempe dan tahu

Tempe merupakan makanan yang memiliki nilai gizi yang cukup tinggi dan telah mendunia. Di Kabupaten Lampung Utara produksi tempe maupun tahu masih sangat minim, namun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di wilayah Lampung Utara masih terpenuhi. Industri tempe di Lampung Utara terdapat di Kecamatan Bukit Kemuning, Kelurahan Sribasuki dan Rejosari Kecamatan Kotabumi.

h. Produksi Kopi

Kopi Lampung sangat terkenal tidak hanya di dalam negeri namun juga telah terkenal di manca Negara. Terutama saat ini telah terdapat produk kopi luak

Lampung. DiKabupaten Lampung Utara juga terdapat kopi pinang muda yang dapat meningkatkan stamina. Produksi kopi Lampung Utara tersebar di beberapa wilayah Kecamatan, hal ini merupakan peluang investasi yang sangat menjanjikan.⁷⁰

B. DPD PKS Lampung Utara

1. Sejarah Berdirinya DPD PKS Lampung Utara

Cikal bakal Partai Keadilan sejahtera lahir dari perjalanan panjang politik Islam di Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik yang berbasis Islam di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan di Jakarta pada 09 Jumadil ‘Ula 1423 yang bertepatan dengan 20 April 2002, merupakan pelanjut dari Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta pada hari senin, 26 Rabiul Awal 1419 H yang bertepatan dengan 20 juli 1998. Dalam sebuah konferensi pers di aula Masjid Al-Azhar. Presiden atau ketua partai ini adalah Nurmahmudin Isma’il.⁷¹

Perolehan pemilu pada tahun 1999 yang dibawah *electoral threshold* (PK gagal memenuhi ketentuan perolehan minimal)⁷² membuat masa empat tahun berikutnya digunakan PK untuk melakukan konsolidasi besar-besaran dengan memunculkan partai baru bernama PKS yang diharapkan membuka jalan bagi nilai-

⁷⁰*Ibid.*, h. 12.

⁷¹Mardani Umar, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wawancara dengan penulis, Gedung Negara, 04 Juli 2017.

Sebelum menjadi anggota DPRD, Mardani Umar adalah seorang ketua umum DPD PKS Kotabumi Lampung Utara pada tahun 1999-2005.

⁷²Erwyn Kurniawan, *PKS Mengubah Pusaran Menjadi Arus Balik*, (Jakarta: Pustaka Fauzan, 2016), Cet. Ke-2, h. 11.

nilai kebenaran, kebaikan, ketakwaan, keindahan dan kebahagiaan. Keadilan yang menyediakan ruang bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menebarkan rasa aman serta membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut.⁷³

Selain berada di tingkat pusat, PKS juga ditempatkan di beberapa wilayah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkat desa yang ada di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut dilakukan supaya tujuan utama berdirinya partai politik dapat terwujud, dengan strategi mendirikan kantor-kantor cabang partai di setiap wilayah, daerah, bahkan sampai pelosok desa. Organisasi yang berada di tingkat wilayah Provinsi disebut dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sedangkan yang berada di tingkat daerah Kabupaten/Kota disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang berada di tingkat Kecamatan disebut (DPC) serta organisasi tingkat Desa/Kelurahan disebut (DPRA). Dari masing-masing organisasi partai tersebut memiliki struktur kepengurusan tersendiri yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus wilayah tersebut.

Pada awal berdirinya DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Lampung Utara periode I sewaktu PK belum berganti menjadi PKS dipimpin oleh Mardani Umar (1998-1999) setelah PK menjadi PKS kepemimpinan dilanjutkan oleh Zainul Arifin (1999-

⁷³DPP PKS, *Sekilas Partai Keadilan*, h. 25.

2005) pada priode ke II Tri Purwo Handoyo (2005-2010) kemudian pada priode ke III Zainul Arifin (2010-2015) dan priode ke IV Agung Utomo (2015-2020).⁷⁴

Adapun landasan partai ini adalah Al-Qur'an yang meliputi surat al-Syura:13, al-Nur:55, al-Shaf: 10-13 dan Al-An'am:153. Dasar pemikiran partai ini adalah *syumuliyat Al-Islam* (kesempurnaan Islam, agama dan Negara) dengan menjadikan partai ini sebagai partai dakwah yang merefleksikan ke seluruh sikap, prilaku dan aktifitasnya. Partai ini memiliki lambang kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, dan keserasian dengan warna hitam yang melambangkan aspiratif, akomodatif, dan kepastian. Dua bulan sabit melambangkan kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, pencerahan dan kesinambungan sejarah. Dengan untaian 17 butir padi pada tangkai tegak lurus diantara dua bulan sabit melambangkan adil, ukhuwah, istiqamah, berani dan tegas dalam mewujudkan kesejahteraan. dibawahnya terdapat tulisan "SEJAHTERA" diatas kotak hitam terdapat sebuah persegi panjang yang panjangnya sama dengan kotak dibawahnya tetapi dengan ketinggian yang lebih rendah didalamnya tertulis "PARTAI KEADILAN" dengan warna kuning emas melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan dan kejayaan.⁷⁵

⁷⁴Zaenal mu'arif, ketua bidang Kepemudaan DPD PKS Lampung Utara, Wawancara dengan penulis, Kotabumi, 14 Juli 2017.

⁷⁵AD/ART Partai Keadilan Sejahtera, *Op. Cit.* h. 17.

2. Struktur organisasi DPD PKS Lampung Utara

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama antara sesama anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi menyediakan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Hubungan kerja dalam sebuah organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi yang merupakan gambaran sistematis dengan orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. struktur organisasi partai terdiri atas:

a. Struktur organisasi Partai ditingkat pusat adalah:

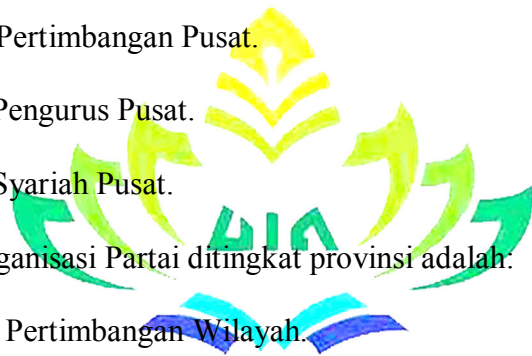
1. Majelis syura.
2. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
3. Majelis Pertimbangan Pusat.
4. Dewan Pengurus Pusat.
5. Dewan Syariah Pusat.

b. Struktur organisasi Partai ditingkat provinsi adalah:

1. Majelis Pertimbangan Wilayah.
2. Dewan Pengurus Wilayah.
3. Dewan Syari'ah Wilayah.

c. Struktur organisasi Partai ditingkat Kabupaten/kota adalah:

1. Majelis Pertimbangan Daerah.



2. Dewan Pengurus Daerah.
 3. Dewan Syari'ah Daerah.
- d. Struktur organisasi Partai ditingkat Kecamatan adalah: Dewan Pengurus Cabang.
- e. Struktur organisasi Partai ditingkat kelurahan/desa adalah: Dewan Pengurus Ranting.

Dewan Pengurus Daerah PKS adalah lembaga eksekutif tingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Di dalam struktur DPD terdiri atas seorang ketua umum, beberapa ketua bidang dan beberapa ketua badan, seorang sekretaris umum dan beberapa wakil sekretaris umum, seorang bendahara umum dan beberapa wakil bendahara umum serta beberapa bagian.⁷⁶

Syarat Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang Pembinaan Kader, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa keanggotaan sekurang-kurangnya 2 tahun.
- b. Pernah menjadi anggota dalam kepengurusan tingkat daerah
- c. Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.

⁷⁶*Ibid.*, h. 37.

- d. Memiliki wawasan dakwah dan syari'ah, sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkan melaksanakan tugas.
- e. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.
- f. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah.⁷⁷

Syarat ketua-ketua bidang lainnya, ketua-ketua badan, wakil sekretaris umum, dan wakil bendahara umum Dewan Pengurus Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya anggota dewasa.
- b. Pernah menjadi anggota dalam kepengurusan tingkat daerah.
- c. Taqwa, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kesabaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatismekepentingan pribadi dan golongan.
- d. Memiliki wawasan dakwah dan syari'ah, sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas.
- e. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.
- f. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah .

Ketua umum Dewan Pengurus Daerah berwenang membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus

⁷⁷*Ibid.*,

Wilayah, dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

Tugas Struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Wilayah, putusan Musyawarah Daerah, dan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- b. Menarik dan mengelola iuran anggota dan iuran wajib keanggotaan sesuai dengan panduan Dewan Pengurus Pusat.
- c. Menerima waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat.
- d. Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Pengurus Wilayah.
- e. Bersama Musyawarah Pimpinan Daerah mengusulkan nama pasangan calon kepala daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Pengurus Wilayah.
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan realisasi anggaran setiap 6 bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah.
- g. Mengesahkan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang.
- h. Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pengurus Cabang.
- i. Melaksanakan Musyawarah Daerah dan
- j. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah beserta lembaga-lembaga struktur di bawahnya.
- b. Rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah setelah dikompilasi dengan rancangan program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari'ah Daerah dan
- c. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.

Tugas manajerial Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah.
- b. Membentuk dan mengesahkan struktur organisasi dan kepengurusan tingkat Kecamatan.
- c. Memimpin dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
- d. Atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai dengan memperhatikan kesepakatan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, serta
- e. Merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi kader partai di daerah.

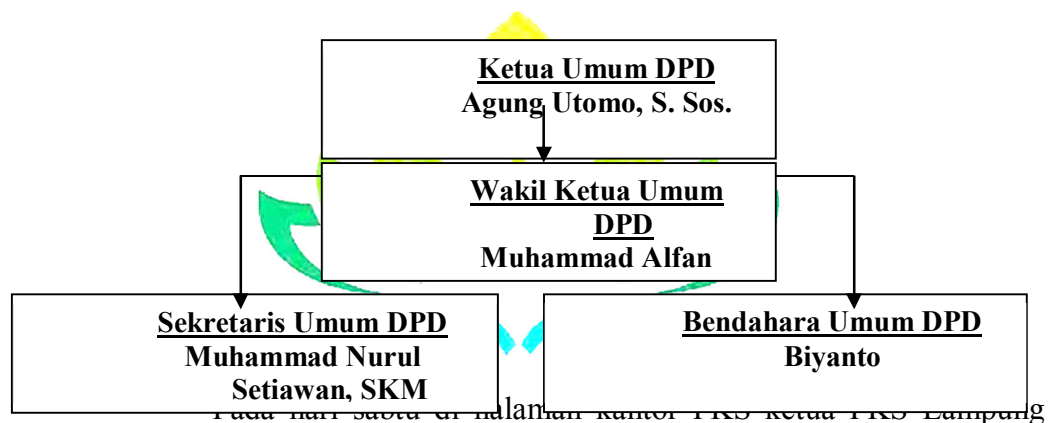
Tugas Operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi partai.
- b. Mempersiapkan kader partai dalam berbagai bidang.
- c. Melaksanakan koordinasi kader partai anggota legislatif dan eksekutif serta⁷⁸
- d. Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus dakwah, kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik, serta kepemimpinan.

Adapun struktur kepengurusan DPD PKS Lampung Utara diantaranya: Ketua Umum DPD PKS, Wakil ketua umum DPD, Sekretaris Umum DPD PKS, Bendahara Umum DPD PKS, Humas dan penggalangan opini.

Susunan Pengurus DPD PKS Lampung Utara

Masa Khidmat 2015-2020



yaitu Ahmad Mufti Salim melantik pimpinan PKS Lampung Utara, selain Agung Utomo dilantik sebagai ketua umum PKS Lampung

⁷⁸*Ibid.*, h. 38.

Utara, Mufti juga melantik Muhammad Alfian sebagai Wakil Ketua Umum, M. Nuzul Setiawan sebagai Sekretaris umum, Biyanto dan Tri Purwo Handoyo sebagai Bendahara Umum dan ketua Kaderisasi PKS Lampung Utara.⁷⁹

Adapun bidang-bidang yang ada di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lampung Utara adalah:

1. Bidang Kaderisasi, yang di ketuai oleh: Drs. Tri Purwo Handoyo dan Sekretaris: EkoYulianti, A. Md.
2. Bidang Kepemudaan, yang di ketuai oleh: Jaenal Mu'arif, S.E dan Sekretaris: Adi Susanto, S. Pd.I.
3. Bidang Kepanduan dan Olah raga, yang diketuai oleh: Hendri Naldi dan Sekretaris: Ernato.
4. Bidang Perempuan dan ketahanan keluarga, yang diketuai oleh: Nanik Masrurin dan sekretaris: Endang Eriyana, S. Pd.I.
5. Bidang Pemenangan pemilu dan pilkada, yang diketuai oleh: Rahmatullah dan sekretaris: Imam Sururi, L.c.
6. Bidang Hubungan masyarakat, yang diketuai oleh: Erika Mirnasari, S.pd. dan sekretaris: Wagimin.
7. Bidang Polhukum (politik, hukum, dan keamanan), yang diketuai oleh: Pirli Adhar, S.H. dan sekretaris: Adi Mulyata, S.H.
8. Bidang pembangunan keumatan dan dakwah, yang diketuai oleh: Yudi Surono, L.c., MHI. Dan sekretaris: Rusmini.

⁷⁹Lampung.pks.id/2015/10/25/Agung-utomo-pimpin-dpd-pks-Lampung-Utara/ diunggah pada tanggal 14 Juli 2017.

9. Bidang Kesra (Kesejahteraan Umat), yang diketuai oleh: Nur'aini, S.Pd.I. dan sekretaris: Fitri Marlina, S. Pd.I.
10. Bidang Pekerja, petani, nelayan. Yang diketuai oleh: Edi Suryana dan sekretaris: Muji Rijani.⁸⁰

3. Visi dan Misi PKS

Setelah berganti nama dari Partai Keadilan (PK)⁸¹ menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maka visi misinyapun mengalami perubahan, akan tetapi tidak merubah maknanya.

Visi umum: Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa.

Visi Khusus: Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai:

1. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁸⁰ Arsip DPD Partai Keadilan Sejahtera, 2015.

⁸¹ Sebelum PK menjadi PKS, partai menjabarkan 10 poin visi-misinya yaitu:

Visi PK

1. Menjadi unsur pertekat dan pengarah kesatuan bangsa.
2. Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, sekaligus tangga menuju kepemimpinan nasional.
3. Menjadi pelopor pengembangan kultur pelayanan dalam tradisi politik Indonesia.
4. Menjadi dinamisor pembelajaran bagi bangsa Indonesia.
5. Menjadi akselerator bagi terwujudnya masyarakat madani.

Misi PK

1. Berjuang mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.
2. Menegakkan eksistensi politik umat Islam di Indonesia.
3. Berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Mengembangkan tradisi profesionalisme pengelolaan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Ikut memberi kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan peradaban dunia.

2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam *rahmatul lil 'alamin*.
4. Akselelator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.⁸²

Adapun Misi Partai Keadilan Sejahtera yaitu:

1. Menyebarkan dakwah Islam mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan wihdatul ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.

⁸²Dendi Sutarto, *Op. Cit.* h. 61.

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezaliman khusus terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

4. Pola Pengkaderan

Partai Keadilan Sejahtera melalui para kadernya mampu melakukan fungsinya sebagai partai politik yang jarang dilakukan oleh partai politik lainnya. Seperti memberi pendidikan serta pemberdayaan politik terhadap rakyat melalui aktifitas-aktifitas serta kewajibannya sebagai warga negara dan menyadari wewenang dan kewajiban pemerintahannya.⁸³

Seleksi dan pola rekrutmen kader PKS unik dalam perpolitikan Indonesia, kader PKS dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan diri tetapi diajukan oleh sekelompok individu dan atau oleh *murabbi* (guru pembimbing) menggunakan metode tarbiyah berkesinambungan dan terjadwal (*halaqah*).

PKS menggunakan dua strategi dalam merekrut kader. Yang pertama adalah pola rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardiyyah*), atau bentuk pendekatan orang per orang meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti *usrah* (keluarga), *halaqah* (kelompok studi), *liqa* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkemahan), *daurah* (pelatihan intelektual), *nadwah* (seminar). Sistem yang digunakan PKS ini mirip dengan sistem rekrutmen gerakan Islamis di Mesir. Yang kedua adalah pola rekrutmen institusional (*al-da'wah al'amma*). PKS berafiliasi dengan berbagai

⁸³Satria Hadi Lubis, *35 manfaat dan alasan mengapa kita perlu mendukung PKS*, (Jakarta: Masyarakat publication, 2003), h.v.

organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal, sehingga partai dapat mencari individu potensial untuk dijadikan kader partai.

PKS mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam pelatihan hierarkis yang disebut *marhalah*. Pelatihan ini mencakup proses pembelajaran (*ta'lim*), pelatihan keorganisasian (*tandzim*), pembinaan karakter (*taqwin*), dan evaluasi (*taqwim*). Dalam sumpahnya sebagai anggota PKS, kader harus mengucapkan baiat secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat, dengan demikian sistem sumpah ini tidak memungkinkan non muslim menjadi kader PKS. Namun sesuai dengan munas 2010 di Jakarta, PKS membedakan antara kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat oleh sistem kaderisasi, sehingga sudah pasti seorang muslim. Sementara anggota adalah siapa saja yang terikat kepada organisasi dan bersifat lebih umum dan terbuka.

5. Ideologi dan Platform PKS

a. Ideologi PKS

Sejak awal berdirinya, partai jaringan dakwah kampus ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai partai Islam. Lebih dari itu partai ini merencanakan dirinya sebagai partai dakwah yakni partai yang mendeklarasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua orang dan merealisasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan.

Hal ini sama terjadi ketika PK berubah menjadi PKS, PKS merupakan kontinuitas ideologi, pemikiran, serta *manhaj* perjuangan PK. Bahkan ketika berubah menjadi PKS tampak terjadi penguatan ideologi dan

agenda Islamis dan artikulatif.⁸⁴ Dalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa PKS adalah partai yang berasaskan Islam partai ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagai mana di maksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁵

b. Platform PKS

1. Pemantapan Ekonomi Makro

Membangun kembali fundamental ekonomi yang sehat dan mantap demi meningkatkan pertumbuhan, memperluas pemerataan, dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dengan sasaran utama menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

2. Pemantapan Otonomi Daerah

Kebijakan Otonomi Daerah dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan. Pembagian sumber keuangan yang adil dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan agenda strategis, disamping penegakan hukum yang tegas atas setiap penyimpangan di daerah.

3. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Membangun sektor riil yang kuat dan berdaya demi mengangkat derajat hidup rakyat yang terpinggirkan, terutama kaum tani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil serta kelompok yang berada di bawah garis

⁸⁴M. Imadudin Rahmat, *Ideologi politik PKS dari masjid kampus hingga ke gedung parlemen*, (Jakarta: Lkis, 2000) h. 144.

⁸⁵AD/ART Partai Keadilan Sejahtera, *Op. Cit.* h. 2.

kemiskinan. Mengembangkan unit usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja, dan pemantapan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif solusi.

4. Perjuangan Petani

Mengembalikan kedudukan petani sebagai aktor pembangunan, bukan lagi obyek yang mudah diperdaya dan diperas. Memajukan prinsip kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan agar ditegakkan dalam dunia pertanian.

5. Perjuangan Buruh

Memperbaiki kondisi buruh domestik dan migran yang amat memprihatinkan, agar tidak lagi dijadikan komoditas ekonomi dan politik belaka. Membangun solidaritas yang genuin di kalangan buruh kasar dan pekerja berdasi, demi terjaminnya hak dan masa depan buruh lebih baik.

6. Perjuangan Nelayan

Mendorong pembentukan serikat nelayan yang profesional dan berdaya, mampu memenuhi kebutuhan anggota dan melindungi hak nelayan yang dirampas. Mengembangkan pendidikan berbasis kelautan, pemanfaatan teknologi perikanan, serta pemajuan budaya hemat dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan.

7. Usaha Kecil Dan Menengah

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai penguatan sektor UKM yang terbukti telah memberikan kontribusi besar bagi

perekonomian nasional. Memacu kinerja kelompok pengrajin, pengusaha tekstil, pengolah bahan pangan, pedagang eceran sampai asongan yang sanggup bertahan di masa krisis, agar ekonomi Indonesia bangkit dengan basis yang lebih mandiri.

8. Politik Nasional

Memastikan konsolidasi demokrasi dengan kehadiran pemimpin nasional yang amanah dan bersih. Tetapi membangun sistem politik yang sehat dan kuat lebih menentukan, sehingga sejumlah agenda besar harus dijalankan untuk membenahi lembaga publik agar representatif dan bertanggung-jawab.

9. Pertahanan Keamanan

Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar pertahanan dan keamanan negara. Menempatkan polisi selaku aparat penegak hukum dan tentara sebagai alat pertahanan negara. Menghadapi gejolak masyarakat dengan metoda dialog dan perdamaian, disamping penegakan hukum dan perwujudan kesejahteraan.

10. Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM

Memadukan proses penegakan hukum yang bertanggung-jawab agar tak terpisahkan dengan perlindungan HAM. Melakukan terobosan hukum dalam memerangi korupsi dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, demi memutuskan hubungan dengan penyimpangan di masalalu sebagai manifestasi keadilan transisional.

11. Politik Luar Negeri

Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

12. Pendidikan Nasional

Menjadikan pendidikan sebagai proses pengembangan potensi manusia yang utuh.

Merancang sistem pendidikan nasional yang komprehensif dengan cakupan alternatif pembiayaan yang murah tapi berkualitas. Merealisasikan alokasi 20% anggaran negara bagi kemajuan pendidikan, terutama demi peningkatan kesejahteraan pendidik.

13. Kepeloporan Pemuda

Membina pemuda hari ini sebagai calon pemimpin masa depan. Menyelamatkan generasi muda Indonesia yang terjerat dalam bayang-bayang budaya global dan dekadensi moral, dengan strategi pembelajaran kolektif kaum muda dalam memahami sejarah bangsa dan mensiasati masa depan yang penuh tantangan.

14. Perempuan Indonesia

Mendorong suasana kemitraan yang tulus antara kaum perempuan dan lelaki di atas landasan ketaqwaan, dengan orientasi kerja menebar

kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mewujudkan perempuan Indonesia yang bertaqwa, sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudaya.

15. Pembinaan Keluarga

Membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya di atas landasan nilai-nilai moral demi terwujudnya masyarakat Indonesia aman dan damai, adil dan makmur. Mengarahkan keluarga sakinah sebagai pembentuk generasi yang menentukan corak peradaban bangsa.

16. Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial

Menetapkan visi kesehatan paripurna selaku panduan strategis untuk dijalankan secara berkelanjutan. Mengalokasikan anggaran negara yang memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas sebagai bagian amat penting dari wujud kesejahteraan sosial.

17. Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kemauan politik pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan tanggung-jawab internasional Menjadikan kehidupan seluruh umat manusia yang layak di bumi yang satu, sebab baru bumi satu-satunya ini yang layak dihuni.

18. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri

Mensinergikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai jalan keluar untuk merintis kembali pembangunan industri strategis yang kolaps. Selanjutnya meningkatkan penguasaan iptek menjadi tiket utama menuju Indonesia yang maju dan mandiri.

19. Seni, Budaya, dan Pariwisata

Membentuk bangsa yang memiliki disiplin kuat, etos kerja, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu karakter warga bangsa yang tanggu.

20. Dakwah Dan Pembinaan Umat Beragama

Menempatkan dakwah sebagai proses penyucian diri manusia sesuai fitrahnya selaku hamba Allah dengan mencontohkan, menyeru kepada kebaikan, dan membentuk kepribadian bangsa. Menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati.

21. Komunikasi Dan Informasi

Menggenapi prinsip kebebasan informasi dengan kejujuran dalam berkomunikasi disertai penegakan etika profesi dan pemberian sanksi hukum bagi pelanggaran informasi. Menjaga semangat kebebasan berkespresi agar tidak dikekang oleh kepentingan politik tertentu.⁸⁶

C. Bidang perempuan DPD PKS di Kabupaten Lampung Utara

1. Bidang perempuan

Bidang Perempuan adalah salah satu bidang yang ada di dalam Partai Keadilan Sejahtera. Tujuan dari bidang perempuan dan ketahanan keluarga itu sendiri yaitu meningkatkan kuantitas kader perempuan,⁸⁷ menghadirkan publik

⁸⁶DPP PKS, *Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, h.58.

⁸⁷Kumpulan draft panduan bidang perempuan dewan pengurus pusat Partai Keadilan Sejahtera.

figur perempuan PKS yang diakui dan diterima di tengah masyarakat, memperluas akses dan pengaruh dakwah di kalangan masyarakat.

Adapun visi yang diemban oleh bidang perempuan, yaitu:
Terkokohnya kader perempuan sebagai pilar bangsa. Karena sejatinya perempuan adalah sosok penentu bagi kebaikan bangsa, sosok yang zaimat, sholihah dan ‘alimat.

Dalam mengemban visi tersebut bidang perempuan menjabarkan kedalam misinya yaitu:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kader perempuan agar mampu merelisasikan tujuan-tujuan dakwah dan mampu mengelolanya.
2. Mengkokohkan struktur bidang perempuan untuk menghantarkan kader perempuan dan institusi dakwah pada peran optimalnya dalam merelisasikan tujuan-tujuan dakwah.
3. Mengkokohkan peran yang diambil kader perempuan diberbagai bidang dan sektor secara konsepsional dan operasional.
4. Meningkatkan akseptibilitas bidang perempuan PKS dalam rangka mengkokohkan peran dan posisi kader perempuan pada peta politik lokal, nasional dan internasional.
5. Mengelola dan memobilisasi sumber daya kader perempuan secara optimal untuk kemajuan umat, bangsa dan negara.

Dalam melaksanakan visinya bidang perempuan ditopang dengan keberadaan tiga deputi yaitu:

a. Deputi ketahanan keluarga.

Merupakan deputi baru dalam bidang ini, yang lahir dari sebuah keinginan untuk mewujudkan keluarga dakwah yang kokoh sebagai basis penegak nilai-nilai Islam di masyarakat sehingga menjadi model bagi keluarga Indonesia.

b. Deputi kajian perempuan, anak dan keluarga.

Merupakan deputi yang akan merumuskan kebijakan publik terkait permasalahan perempuan, anak dan keluarga.

c. Deputi peningkatan kapasitas kader perempuan.

Deskripsi kerja deputi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas perempuan menjadi pemimpin yang kokoh untuk bisa berkiprah pada peran-peran strategis diberbagai sektor.

2. Kebijakan umum PKS tentang perempuan

Kebijakan merupakan hasil dari keputusan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok orang yang disepakati secara musyawarah dan dijadikan sebagai pedoman aturan yang harus diikuti. Sesuai wawancara dengan Agung Utomo Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera memberikan peluang yang cukup besar pada kaum perempuan untuk ikut berperan dalam dunia politik. Dapat dilihat sejak berlakunya tindakan afirmasi untuk perempuan, PKS adalah salah satu partai politik sudah memiliki komitmen untuk mengusung kebijakan tersebut dengan memberikan kuota 30% bagi perempuan dalam struktur kepengurusan partai dan menempatkan 30% caleg

perempuan. Kuota itu tercantum dalam UU No.8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD selain itu komisi pemilihan umum juga telah menerapkan peraturan terkait pemilu 2014 dalam aturan pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.⁸⁸

PKS Lampung menetapkan 37,14% struktur kepengurusannya yang merupakan perempuan, sebanyak 52 dari 140 pengurus harian PKS selampung yang terdaftar saat proses verifikasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung adalah perempuan. Jumlah tersebut setara dengan 37,14% melampaui syarat kuota keterwakilan perempuan bagi partai politik serta pemilu 2014 yaitu 30%. Ditingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) atau Kabupaten Kota, presentasi bahkan sedikit lebih tinggi, mencapai 37,5%.

Selain itu PKS juga memiliki bidang tidak terpisahkan yang bergerak di bidang perempuan yang bertugas menggalang dan mendidik kader-kader perempuan PKS serta masyarakat. Bidang tersebut adalah Bidang Perempuan dan ketahanan keluarga (BPKK) yang berkecimpung menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan masyarakat dibidang perempuan dan ketahanan keluarga diantaranya: pembekalan pranikah, keharmonisan keluarga, pendidikan keluarga dan anak, sahabat anak dan remaja, poseka, konseling advokasi keluarga, pembinaan lansia serta pendidikan politik.

⁸⁸ Agung Utomo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah PKS Lampung Utara, Wawancara dengan penulis, Kotabumi, 23 Juli 2017.

Partisipasi perempuan dalam politik, terutama dalam perolehan suara pada pemilu sangat signifikan, oleh sebab itu partai perlu memiliki kebijakan dasar mengenai keterlibatan perempuan dalam politik:

- a. Mengoptimalkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan dengan tetap memelihara harkat dan martabat kewanitaanya.
- b. Membangun kondisi yang kondusif bagi optimalisasi peran politik wanita dalam mengusung cita-cita politik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan fitrah.
- c. Keseimbangan hak pemberdayaan politik.
- d. Keseimbangan proposional dalam penempatan wanita di lembaga-lembaga strategis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁸⁹
- e. Perhatian yang cukup terhadap isu-isu kontemporer wanita yang berkembang di masyarakat.
- f. Menjadikan institusi keluarga sebagai lembaga pendidik politik.

Berdasarkan uraian diatas, baik dari tindakan afirmasi untuk perempuan, ART partai (BAB III pasal 4), Platform kebijakan partai, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PKS tentang perempuan yaitu mengikutsertakan perempuan untuk berkiprah dalam ranah politik dan setengah dari anggota PKS di Lampung Utara adalah perempuan, merupakan suatu bentuk konsistensi PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan terhindar dari diskriminasi yang dibuat oleh budaya masyarakat itu sendiri. Program-program kegiatan BPKK dapat dilihat dalam daftar lampiran.

⁸⁹Arsip, Partai Keadilan Sejahtera.

BAB IV

KIPRAH PKS DALAM MEMPERJUANGKAN HARKAT DAN MARTABAT PEREMPUAN DI LAMPUNG UTARA

Dalam bingkai kehidupan sosial dan politik, masyarakat Indonesia secara umum memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik termasuk menjadi pemimpin, bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk penetapan kuota 30% perempuan dalam parlemen.

Kuota 30% merupakan momen untuk menguji seberapa besar partisipasi perempuan dalam politik perempuan dalam politik dan sekaligus menguji komitmen partai politik terhadap perempuan. terutama partai-partai Islam yang rawan menggunakan jargon-jargon keagamaan dalam pemilu. Sistem kuota 30% setidaknya menjadi gerbang bagi keterwakilan perempuan, walaupun berbagai respon yang berbeda muncul dari parpol yang berasaskan Islam, yakni penghapusan kata-kata “memperhatikan kesetaraan gender” yang diusulkan dari partai PBB.⁹⁰ Terminologi “gender” bagi sebagian parpol Islam masih dipandang sebagai “anti Islam”. Perdebatan tentang kuota 30% justru semakin menarik manakala PKS justru berhasil menempatkan caleg perempuan lebih dari 30% pada pemilu 2004 sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Namun dari proses dan pertarungan politik Indonesia, masih perlu menguji apakah mereka telah sungguh-sungguh menerima perempuan sebagai konsekuensi

⁹⁰Dendi Sutarto, *Perempuan Dalam Politik Partai Keadilan Sejahtera, ...*, Loc. Cit, h.121.

demokrasi dengan cara menempatkan perempuan dalam urutan “daftar calon jadi” dan bukan “calon jadi-jadian” atau sekedar “jadi calon”.

Dalam siaran pers yang dilakukan oleh CETRO (*Center For Electoral Reform*), dari empat data partai politik (PPP, PKB, PAN, dan PKS) terdapat penemuan penting PKB, PAN dan PKS rata-rata menominasikan 30% caleg perempuan. sementara PPP hanya menominasikan 20% perempuan dalam daftar calon legislatif, kemudian diikuti PKB sebanyak 29,7%, PAN 32% dan PKS 32%.⁹¹

Dari sini, penulis akan melihat adakah kebijakan PKS tentang perempuan yang benar-benar konsisten dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan untuk berperan dalam bidang politik dengan melihat platform partai, serta mengetahui usaha atau perjuangan yang telah dilakukan melalui program-program kegiatan yang telah dilaksanakan di Lampung Utara.

A. Platform PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara.

Platform merupakan modal yang berharga bagi para kader dan simpatisan untuk memperkenalkan partai di tengah masyarakat yang beragam. Tetapi, masyarakat yang sedang dirundung krisis membutuhkan bukti dan tindakan yang kongkrit, bukan sekedar konsep atau janji muluk. Untuk itu, tugas fungsionaris partai tingkat nasional (DPP), Provinsi (DPW), Kabupaten/kota (DPD) dan

⁹¹*Ibid.*,

Kecamatan (DPC) hingga Kelurahan/desa (DPRa) menerjemahkan platform tersebut menjadi program dan kegiatan yang nyata.⁹²

Banyak orang yang berbeda pandangan dalam menanggapi, bagi mereka yang skeptis, platform tak ubahnya iklan yang penuh basa-basi. Namun bagi pihak yang mencoba rasional, platform adalah alat ukur untuk menakar kesamaan kepentingan diantara kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang. Dengan pijakan platform bisa dicari titik temu dan bisa pula dimaklumi titik beda masing-masing kelompok. Tidak ada partai yang bisa menang Pemilihan Umum (pemilu) dengan hanya mengandalkan sebuah platform. Rakyat butuh sesuatu yang lebih kongkrit ketimbang rangkaian kata dan konsep muluk. Tidak adapula penguasa yang mampu bertahan lama berkuasa tanpa menjalankan suatu platform. Kekuasaan yang tak teruji lebih mudah di jatuhkan, jika tidak dapat dikatakan menjerumuskan diri sendiri dalam kehancuran.

Adapun Platform PKS tentang perempuan Indonesia yaitu:

Mendorong suasana kemitraan yang tulus antara kaum perempuan dan lelaki di atas landasan ketaqwaan, dengan orientasi kerja menebar kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Mewujudkan perempuan Indonesia yang taqwa, sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudaya.⁹³

Perempuan adalah mitra laki-laki. Kemitraan itu merupakan bentuk kerja sama dalam kerangka memerintahkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Karena itu kerjasama kaum perempuan dan laki-laki berada di atas landasan taqwa. Fakta yang terjadi tidak seindah

⁹²DPP PKS, *Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera*, Op. Cit. h. x.

⁹³*Ibid.*, h.108.

idealita. Kondisi perempuan Indonesia amat memprihatinkan menurut statistik tahun 2000, jumlah rumah tangga miskin naik dari 6,36 juta 1996 menjadi 9,64 juta 1999. Begitupun dengan soal kesehatan dan pendidikan. Angka kematian ibu di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni 330 jiwa per 100.000 kelahiran. Sementara di sektor pendidikan, angka buta huruf perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Yang paling menyedihkan, kekerasan terhadap perempuan berupa pelecehan dan pemerkosaan selalu meningkat tiap tahun.

PKS peduli terhadap persoalan perempuan, lima langkah strategi dijalankan untuk mewujudkan perempuan Indonesia: Bertaqwa, sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudaya.

Langkah *pertama*: mewujudkan perempuan Indonesia bertaqwa dipenuhi dengan cara memperjuangkan hak perempuan dalam menjalankan syari'at agama, mendapat pendidikan dan bimbingan rohani, serta mendukung pengalokasian dana khusus bagi kegiatan keagamaan perempuan.

Kedua: untuk mewujudkan perempuan Indonesia sejahtera terangkum dalam delapan usaha, yaitu pengalokasian anggaran untuk pemberdayaan keluarga miskin, pemenuhan gizi wanita hamil dan menyusui, jaminan sosial ibu melahirkan, upah yang adil bagi pekerja perempuan, jam kerja ramah perempuan, fasilitas umum ramah perempuan, ketegasan hukum terhadap pelanggaran harkat dan

martabat perempuan, serta jaminan sosial bagi ibu dan anak korban kekerasan.⁹⁴

Ketiga: sosok perempuan Indonesia yang cerdas diwujudkan dengan lima upaya yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan minat dan kemampuan intelektualnya, mengelola bantuan dana pendidikan, mengembangkan kurikulum pendidikan ramah perempuan, memperbaiki sarana dan kesejahteraan kaum perempuan yang banyak berprofesi sebagai pendidik, serta menumbuhkan dan membudayakan jiwa wirausaha perempuan.

Keempat: perempuan Indonesia berdaya diupayakan dengan enam program: aktif memberi kontribusi melalui gagasan dan karya bagi kemajuan bangsa, bersikap kritis terhadap kebijakan publik, meningkatkan peran perempuan di lembaga pengambil keputusan dan menjamin penyaluran aspirasi perempuan, mengangkat martabat dan harkat perempuan dalam area publik, menolak upaya eksploitasi perempuan dan melakukan pembelaan, serta menjalankan profesi perempuan sebagai ibu. Karena itu, PKS mendukung kebijakan afirmasi berupa kuota 30% bagi anggota legislatif perempuan, dengan tetap memelihara harkat dan tanggung jawab utama kaum perempuan dalam pembinaan keluarga.

Dan *Kelima:* dalam mewujudkan perempuan Indonesia berbudaya ditempuh tiga cara, berupa peningkatan kemampuan perempuan dalam

⁹⁴*Ibid.*, h. 109.

mengembangkan ciri budaya Indonesia sebagai bangsa religius, pembangkitan atmosfir budaya yang memuliakan dan mengangkat harkat perempuan, mendorong perempuan aktif berkarya dan berinovasi yang konstruktif.

Secara ringkas, prinsip keadilan dalam kebijakan pemberdayaan perempuan dijalankan dengan memperjuangkan jaminan hukum, misalnya UU yang tegas bagi pelaku pelecehan perempuan, serta UU keselamatan dan kesamaan hak pekerja perempuan, sementara prinsip kesejahteraan dilakukan dengan peningkatan secara signifikan alokasi anggaran negara bagi jaminan sosial, berupa pembebasan biaya melahirkan bagi ibu hamil serta perlindungan perempuan dan anak korban konflik.⁹⁵

Menurut penulis, Platform PKS dapat disimpulkan mengenai perempuan dalam ajaran Islam menjadi esensi dari perjuangan perempuan, perempuan tidak lagi dianggap sebagai objek, dan sebagai pelayan rumah tangga saja, tetapi perempuan harus dilihat sebagai manusia merdeka yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah SWT memiliki fitrah yang suci dan setiap perbuatan akan di pertanggung jawabkan di hadapan-Nya. Semua itu telah di ukur berdasarkan tingkat ketakwaannya bukan berdasarkan jenis kelaminnya, dengan demikian, Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan.

Platform PKS memang sangat menarik jika dibaca dan dipahami, namun hal itu harus di terapkan dalam kehidupan sosial, supaya platform PKS bukan hanya

⁹⁵*Ibid.*, h. 110.

konsep saja karena rakyat butuh sesuatu yang lebih kongkrit ketimbang rangkaian kata dan konsep muluk.

Agung Utomo, selaku ketua DPD PKS Lampung Utara mengatakan:

“Kita bekerja di atas platform, Yang kita lakukan platform itu turunan-turunan kebijakan-kebijakan itu, platform misalnya berkenaan dengan model kerja partai dakwah itu seperti apa.

Nah, dalam platform PKS ini juga ada kebijakan perempuan dalam berpolitik.”⁹⁶

Nanik Masrurin, selaku ketua BPKK Lampung Utara mengatakan:

“Platform PKS yang jelas PKS itu berkhidmat untuk rakyat. kemudian, eee kedepannya ingin ikut serta membangun Indonesia dalam semua lini (bagian), PKS ingin juga ikut berkecimpung dalam segi ekonomi juga di gerakkan, dari segi hukum juga di gerakkan dan ikut berkontribusi.”⁹⁷

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa PKS bekerja sesuai dengan Platformnya namun hal itu harus dibuktikan dengan suatu kegiatan yang nyata, misalnya suatu program kegiatan untuk perempuan dalam bidang politik maupun bidang lainnya. untuk itu kita harus mengetahui bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan oleh PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan sesuai dengan platform partai.

B. Bentuk-bentuk kegiatan PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara.

PKS adalah salah satu partai Islam yang memperhatikan dan mempedulikan persoalan tentang perempuan, dapat dilihat diatas kebijakan-kebijakan yang di buat dan disepakati bersama dalam platform PKS tentang perempuan.

⁹⁶Agung Utomo, *Loc. Cit*, 23 Juli 2017.

⁹⁷Nanik Masrurin, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Wawancara dengan penulis, Kotabumi, 13 Agustus 2017.

Adapun program-program kegiatan PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan, diantaranya:

1. PKS membentuk suatu bidang yang bernama bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Latar belakang adanya bidang perempuan dan ketahanan keluarga adalah menurut Nanik Masrurin selaku ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga: “perempuan dalam PKS terlihat memiliki peran signifikan dalam kesejahteraan partai, di dalam tubuh PKS ini terdapat peran perempuan yaitu bidang perempuan dan ketahanan keluarga, yang melatar belakangi adanya bidang perempuan dan ketahanan keluarga adalah perempuan patut untuk berperan dalam dunia politik bukan hanya berperan dalam urusan rumah tangga saja.”⁹⁸ Tujuan dari bidang perempuan dan ketahanan keluarga yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas kader perempuan PKS,⁹⁹ menghadirkan publik figure perempuan PKS yang di akui dan diterima di tengah masyarakat, memperluas akses dan pengaruh da’wah di kalangan masyarakat.

Menurut penulis, dengan adanya bidang perempuan dan ketahanan keluarga di dalam partai PKS yang selalu rutin dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk pemberdayaan perempuan dalam politik, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. akan mampu menarik simpati masyarakat terhadap PKS, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua DPD PKS dan ketua Bidang perempuan bahwa struktur mendukung semua kegiatan perempuan, dengan di adakan suatu bentuk kegiatan

⁹⁸Nanik Masrurin, *Op. Cit*, 09 Mei 2016.

⁹⁹Kumpulan draft panduan bidang perempuan, *Op. Cit*.

seperti dalam bidang perekonomian di sini ada simpan pinjam uang untuk kebutuhan keluarga, konsultasi mengenai permasalahan keluarga yang mana setiap keluarga memiliki masalah maka bidang perempuan siap untuk memberikan solusi, kegiatan-kegiatan dalam memperingati hari nasional seperti hari ibu, hari kartini, hari buruh, hari anak, penyuluhan kanker serviks pada perempuan.

Agung Utomo, selaku ketua DPD PKS Lampung Utara mengatakan:

“Kondisi struktur dalam kegiatan alhamdulillah masih tetap berjalan, kita juga sudah di siapkan sebuah software program yang cukup rapi jadi program yang dilakukan itu sudah tersusun, jadi bidang perempuan itu tinggal melaksanakan saja, tersusun dalam program rencana tahunan. Nah, itukan jadi mudah kerjanya. Kemudian, memang dapat back-up struktur artinya semua kegiatan perempuan itu di dukung sepenuhnya oleh struktur, walaupun kadang-kadang kurang, kita bersungguh-sungguh karena ini di anggap penting. Terus kemudian kominikasi yang cukup mudah dengan masyarakat setiap melakukan kegiatan di beberapa tempat itu ada yang minta. “Bu kegiatannya disini saja sih perempuan PKS itu” seperti itu ini hal-hal dukungan yang kita perlu kita terima di masyarakat. Tentunya melalui platform dan program di antaranya kita menempatkan perempuan ini bagian dari bidang unggulanlah di struktur itu kan bagian dari itu ya, bahkan di bidang perempuan itu di bawahnya sub-sub bidang nya banyak itu karena mengakomodir itu, kemudian eee kalau kita lihat misalnya dalam persyaratan-persyaratan keterwakilan perempuan dalam penyusunan calon anggota dewan seperti itu juga kita selalu memenuhi syarat. Artinya memang kita menempatkan peran perempuan itu memang sesuai dengan keinginan Undang-undang seperti itu. Dalam melakukan kegiatan juga kita terkadang mengalami hambatan, faktor hambatan yang pertama SDM jadi untuk mencari kader yang sesuai dengan keahliannya di bidang itu, kita agak kesulitan misalnya kader perempuan itu yang mempunyai basis kesehatan misalnya gitukan kita masih kurang walaupun ada tapi masih kurang. Nah itu jadi hambatan kadang-kadang ketika ada acara-acara itu. Kemudian sarana dan prasarana tentunya dalam setiap agenda kegiatan kan pasti dominan kan ya? Di sarana dan prasarana itu, saran penunjang kegiatan, misalnya kita mau melaksanakan kegiatan. Misalnya yang baru-baru ini hari anak, kemudian di hari Ibu kita kumpulkan ibu-ibu di Prokimal, kemudian di Semuli Raya, kemudian kita buatkan semacam acara, apa namanya? eee lesehan semacam itulah mendengarkan mereka bercerita kemudian kita kasih souvenir dan hadiah-hadiah dan sebagainya.

Nah, yang pendanaan-pendanaan semacam itu kadang-kadang ya jadi kendala-kendala. Dan banyak lagi misalnya biaya operasional bidang perempuan belum ada juga di PKS.¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PKS berusaha untuk memperjuangkan harkat martabat perempuan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung keberadaan perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan seperti kurangnya SDM dan biaya operasional dalam kegiatan-kegiatan.

Dalam hal ini PKS berusaha mewujudkan platform poin keempat yaitu: aktif memberi kontribusi melalui gagasan dan karya bagi kemajuan bangsa, bersikap kritis terhadap kebijakan publik, meningkatkan peran perempuan di lembaga pengambil keputusan dan menjamin penyaluran aspirasi perempuan, mengangkat martabat dan harkat perempuan dalam area publik, menolak upaya eksploitasi perempuan dan melakukan pembelaan, serta menjalankan profesi perempuan sebagai ibu. Karena itu, PKS mendukung kebijakan afirmasi berupa kuota 30% bagi anggota legislatif perempuan, dengan tetap memelihara harkat dan tanggung jawab utama kaum perempuan dalam pembinaan keluarga.

Nanik Masrurin, selaku ketua BPPK Lampung Utara mengatakan:

“Eee kondisi struktur dalam kegiatan alhamdulillah masih tetap aktif, sesuai bidang yang diembankan, bidang perempuan dan ketahanan keluarga, eee programnya menitik beratkan kepada eee perempuan, anak, dan keluarga, untuk ketahanan keluarga, yang dilaksanakan itu sesuai dengan program ini juga dari DPD bahwa untuk menciptakan itu eee program utama nya adalah eem RKI, RKI itu rumah keluarga Indonesia yang mana kegiatannya itu dimulai dari eee mempersiapkan seseorang itu eee... membentuk keluarga, dimulai dari eem apa?! Kalau bahasa kita *dauroh*, bukan *dauroh* sih tapi pembekalan pranikah, dimulai dari pranikah

¹⁰⁰Agung Utomo., *Op. Cit.*

kemudian eee dimana seseorang yang akan melangsungkan nikah harus dibekali dengan kesiapannya terutama itu, fisik nya juga diperhatikan, sudah siap belum secara fisik, memang yang pertama itu secara mentalnya, dia sudah siap belum sih untuk berumah tangga maka perlu pembekalan pranikah itu.

Kemudian RKI ini memiliki 8 program utama yang pertama pembekalan pranikah kemudian yang kedua adalah eee harmonisasi suami istri jadi ketika sudah menikah mungkin ada permasalahan dalam rumah tangga, maka ada pembekalan harmonisasi suami istri kemudian ada juga eee program yang namanya konsultasi keluarga, maka ada konsultan-konsultan keluarga yang siap untuk menampung masalah-masalah, ada nomor-nomor yang dapat dihubungi konsultan yang siap untuk menampung masalah-masalah yang ada.

Kemudian ada yang namanya pos eka yaitu pos ekonomi keluarga, ini lebih kearah pada ekonomi keluarga ada bantuan yaitu berupa uang, ada simpan pinjam, ada pembekalan-pembekalan, disitu ada kelompok-kelompok disitu bisa saling berbagi ilmu disetiap kelompok yang memiliki keahlian masing-masing misalkan di Sawojajar itu anggota nya memproduksi kelanting, kemudian memproduksi kripik tempe, naah itu bisa di eee ditukarkan eee tukar ilmu dengan pos eka yang lain misalkan di Semuli Raya itu memproduksi kripik pisang yang kemudian ada peningkatan ekonomi kemudian pembekalan ekonomi keluarga yang untuk orang tua, yang artinya orang tua juga dibekali kemudian kalau di sekolah di lingkungan kita sendiri, kemudian eee RKI sahabat keluarga berdasarkan tingkat kelasnya.¹⁰¹

Berdasarkan wawancara tersebut pelayanan PKS terhadap perempuan di Lampung Utara memang sudah cukup baik sudah sesuai dengan platform point ketiga yang berbunyi: sosok perempuan Indonesia yang cerdas diwujudkan dengan lima upaya yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan minat dan kemampuan intelektualnya, mengelola bantuan dana pendidikan, mengembangkan kurikulum pendidikan ramah perempuan, memperbaiki sarana dan kesejahteraan kaum perempuan yang banyak berprofesi sebagai pendidik, serta menumbuhkan dan membudayakan jiwa wirausaha perempuan.

¹⁰¹Nanik Masrurin., *Op. Cit.*

2. Dalam struktur kepengurusan DPD PKS Lampung Utara terdapat 24 pengurus partai yang terdiri dari laki-laki 18 dan melibatkan 6 perempuan didalamnya.
3. PKS berusaha konsisten terhadap aturan yang dibuat dengan mencalonkan 4 perempuan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara.

Di dalam partai PKS juga hampir semua kader mayoritas perempuan, hal itu adalah suatu bentuk ketaatan PKS terhadap hukum yang memberlakukan kuota untuk perempuan yang terdapat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum menyatakan, setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam berbagai kegiatan-kegiatan dilapangan mayoritas PKS menyertakan perempuan untuk berpartisipasi di masyarakat. Serta perempuan adalah bidang yang diunggulkan dalam partai tersebut.

Agung Utomo, selaku ketua DPD PKS Lampung Utara mengatakan:

“Pelayanan PKS terhadap perempuan itu banyak sekali dengan berbagai kegiatan yang telah kami lakukan. BPKK itu salah satu bidang yang tidak terpisahkan dari DPD PKS Lampung Utara. jadi, ini faktor penunjang yang luar biasa bahkan bisa jadi separo dari anggota PKS ini bisa jadi perempuan bisa lebih malah. Oleh sebab itu memang bidang perempuan ini mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, kemudian karena sangat penting ini ditingkat Kecamatan itu strukturnya tidak semua bidang harus ada tetapi bidang perempuan harus ada di tingkat kecamatan misalnya gini, kabupaten ada bidang olahraga, ada bidang polhukum, pengenalan pemilu, dan sebagainya. nah, untuk di DPC di kecamatan itu yang lain-lain itu. ketika tidak ada SDM tapi bidang perempuannya harus ada gitu karena justru posisi pentingnya posisi strategi bidang perempuan kita ini. tentunya kita menyiapkan program-program eee apa namanya? Program-program yang memang untuk bidang perempuan diantaranya di bidang ekonomi misalnya kita ada yang namanya pos eka itu yang mengelola bidang perempuan. jadi eee prosesnya misalnya tingkat masyarakat

kemudian kita beri dana bergulir, jadi kita kasih bukan di pinjemin, jadi kita kasih dana digunakan untuk usaha apa, kemudian disesama anggota itu bisa saling eee bergantian untuk memanfaatkan dana apa yang kita berikan itu. Itu salah satu untuk ekonomi. Untuk kesehatan misalnya kita intens melakukan penyuluhan-penyuluhan kesehatan untuk perempuan yang belum lama ini misalnya, kita buat penyuluhan penyakit serviks dan kanker payudara juga pernah yang seperti-seperti itu untuk kesehatan.

Kemudian untuk masalah-masalah umum kita punya kegiatan-kegiatan paling rutin misalnya di kelola oleh bidang perempuan termasuk diantaranya RKI mengelola banyak hal termasuk eee baca tulis Al-Qur'an anak-anak, yang mengelola bidang perempuan juga."¹⁰²

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat diambil satu kesimpulan besar bahwa kiprah perempuan di dunia politik tidak ada batasan dengan laki-laki. Selagi perempuan mampu untuk mengerjakan tugas politik yang diembannya maka tidak ada halangan untuk perempuan terjun dalam dunia politik. Terbukti di PKS Lampung Utara jumlah perempuan lebih banyak di bandingkan jumlah kaum laki-laki. Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan platform PKS poin pertama yaitu: mewujudkan perempuan Indonesia bertaqwa dipenuhi dengan cara memperjuangkan hak perempuan dalam menjalankan syari'at agama, mendapat pendidikan dan bimbingan rohani, serta mendukung pengalokasian dana khusus bagi kegiatan keagamaan perempuan.

Nanik Masrurin selaku ketua BPKK Lampung Utara mengatakan:

"Pelayanan PKS terhadap perempuan ya itu tadi PKS ini siap untuk menampung masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat, dengan memberikan solusi yang terbaik. Kemudian penyuluhan kanker serviks kemarin itu adalah suatu bentuk pelayanan PKS terhadap kesehatan perempuan."¹⁰³

Berdasarkan wawancara tersebut bahwasannya PKS berusaha untuk mewujudkan platform point kedua dalam bidang kesehatan, memberikan solusi kepada masyarakat dengan cara berkonsultasi untuk memecahkan permasalahan

¹⁰² Agung Utomo, *Op. Cit.*

¹⁰³ Nanik Masrurin, *Op. Cit.*

yang tengah di hadapi oleh masyarakat . Hal ini sesuai dengan platform PKS pada poin kedua yaitu: untuk mewujudkan perempuan Indonesia sejahtera terangkum dalam delapan usaha, yaitu pengalokasian anggaran untuk pemberdayaan keluarga miskin, pemenuhan gizi wanita hamil dan menyusui, jaminan sosial ibu melahirkan, upah yang adil bagi pekerja perempuan, jam kerja ramah perempuan, fasilitas umum ramah perempuan, ketegasan hukum terhadap pelanggaran hak dan martabat perempuan, serta jaminan sosial bagi ibu dan anak korban kekerasan.

Dalam pelaksanaan sebuah program-program kegiatan tidak luput dari peran penting sebuah kerjasama masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang telah di laksanakan oleh PKS secara konsisten.

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama hingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas.¹⁰⁴ Adapun masyarakat yang merasakan manfaat program semua kegiatan yang di adakan oleh PKS dan adapula yang tidak merasakan manfaatnya dari program tersebut.

Bariyah selaku masyarakat mengatakan:

“Kalau menurut saya pribadi ya lumayan sih sudah sesuai dengan kebutuhan seperti kemarin di adakan penyuluhan perempuan itukan membuat perempuan memperhatikan kesehatannya.”

Nur selaku masyarakat mengatakan:

¹⁰⁴Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 23.

“Belum, soalnya sebagai masyarakat awam tidak pernah mendapatkan manfaat secara langsung, paling-paling tau partai pas coblosan aja, dan kayaknya sama aja partai Islam maupun partai yang lainya”.

Wawancara diatas dengan masyarakat bahwa ada sebagian masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari program kegiatan dan ada pula yang belum merasakan manfaat dari program-program kegiatan yang telah di lakukan oleh PKS di Lampung Utara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsistensi PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan yang dilakukan oleh fungsionaris DPD PKS di Lampung Utara sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Dalam memperjuangkan harkat martabat perempuan khususnya dalam dunia politik telah terimplementasi dalam beberapa bentuk kegiatan. Yaitu PKS membentuk bidang perempuan dan ketahanan keluarga dan keterlibatan saparuh anggota perempuan dalam menduduki jabatan penting di kepengurusan DPD PKS Lampung Utara, dalam struktur partai bidang perempuan sangat di unggulkan kemudian dalam memenuhi kuota perempuan sudah sesuai dengan Undang-Undang terbukti bahwa DPD PKS Lampung Utara mencalonkan 4 perempuan sebagai calon anggota DPRD.

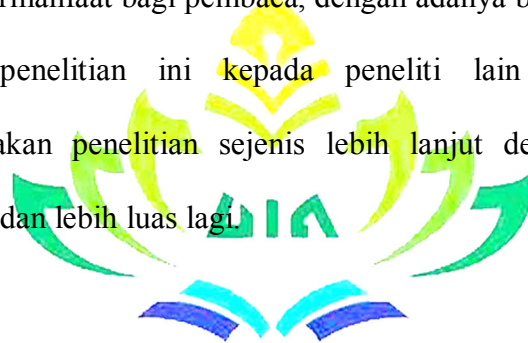
Secara umum, dalam bidang perempuan berusaha mengangkat harkat martabat perempuan melalui kegiatan-kegiatan diluar panggung politik. Diantara program-program kegiatan yang telah dilakukan seperti peningkatan ekonomi, penyuluhan kesehatan perempuan, baca tulis Al-Quran, mengadakan acara peringatan hari nasional, pengajian rutin, terjun langsung ke masyarakat untuk berdakwah guna pemberdayaan perempuan, dan mendengarkan keluhan masyarakat.

Dari usaha-usaha dan kegiatan yang telah dilakukan PKS, merupakan bentuk konsistensi PKS dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara.

B. Saran

Pemahaman skripsi ini dapat dipahami secara jelas bahwa kajian penulis tentang konsistensi partai politik untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan khususnya pada Partai Keadilan Sejahtera sebaiknya dapat lebih ditingkatkan. Karena salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat tidak terkecuali kaum perempuan yang seringkali dinomorduakan karena adanya pembagian peran tugas antara laki-laki dan perempuan yang dibuat oleh budaya masyarakat itu sendiri. sehingga dibuatkanlah kebijakan afirmasi tentang 30% keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, perlu adanya upaya lebih serius yang dilakukan oleh partai politik yaitu dengan cara memberikan pendidikan dan pelayanan yang lebih konsisten terhadap persoalan yang dialami oleh kaum perempuan.

Dengan memaparkan hasil penelitian ini, penulis berharap agar dapat bermanfaat bagi pembaca, dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini kepada peneliti lain diharapkan untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut dengan wilayah yang berbeda dan lebih luas lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Maarif, “Karakteristik wanita mulia dan wanita tercela” Skripsi, Bandar Lampung, Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997.
- Arik unto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan dan praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998.
- Arivia, Gadis *et al*, *Catatan perjuangan politik perempuan*, Jakarta, Yayasan jurnal perempuan, 2004.
- As-Sya’rawi, Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan Muslimah*, Jakarta, Amzah, 2009.
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji, “Citra perempuan dalam politik”, Jurnal, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2008.
- Budiardjo, Miriam, *dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta, Gramedia, 1982.
- Chalil, Moenawir, *Nilai wanita*, Solo, Ramadani, 1984.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Bandung, CV diponegoro, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka, 2006.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. gramedia pustka utama, 2008.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Social*, Yogyakarta, pustaka pelajar, 1996.
- Fatoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011.
- Gatara, A.A. Sahid, *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.

- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002.
- Imarah, Muhammad, *Islam dan pluralitas*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Ismail, Achmad Santori, *Golput haram golput halal*, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2014.
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir, *Istiqamah konsekuen dan konsisten*, Jakarta: Pustaka al Taqwa, 2004.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 1996.
- Koderi, Muhammad, *Bolehkah wanita menjadi imam negara*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Kurniawan, Erwyn, *PKS Mengubah Pusaran Menjadi Arus Balik*, Jakarta, Pustaka Fauzan, 2016.
- Latief, Syahbuddin, *Jalan kemanusiaan*, Yogyakarta, Lapera Putaka Utama, 1999.
- lega, Fransiskus sales, "Martabat Manusia dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant", Jurnal, Ruteng, Teologi STKIP.
- Lubis, Satria Hadi, *35 manfaat dan alasan mengapa kita perlu mendukung PKS*, Jakarta, Masyarakat publication, 2003.
- Muri'ah, Siti, *Nilai-nilai pendidikan Islam dan wanita karir*, Semarang, Rasail Media Grup, 2011.
- Narbuko, Cholid dan abu achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi aksara, 1997.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta, Bumi aksara, 2006.
- Nawawi, Hadar, *Metode Penelitian Social*, Yogyakarta, Gama Press, 1987.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Rahmat, M. Imadudin, *Ideologi politik PKS dari masjid kampus hingga ke gedung parlemen*, Jakarta: Lkis, 2000.
- Ritaudin, Sidi, *Etika politik Islam*, Bandar Lampung, Osa Publishing, 2015.
- S.Handayani, cristina, dan ardian novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, Yogyakarta, PT Lkis pelangi aksara, 2004.
- Saefuddin, *Ijtihad politik cendekiawan muslim*, Jakarta, Gema insani press, 1996.

- Salim, Hadiyah, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Soegiyarto, Soekidjan, *Komitmen organisasi sudahkah menjadi bagian dari kita?*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta, Lkis, 1999.
- Sudarman, *Implikasi Sensitivitas Gender dalam Perspektif Islam Dalam Mengenal Tindakan Kekerasan TKW*, Bandar Lampung, LP2M, 2015.
- Sujana, Nana, *Tuntunan Penulis Karya Ilmiah*, Jakarta, Sinar baru algensindo, 1987.
- Supadi, Didiek Ahmad *et al.*, *Studi Islam II*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutarto, Dendi, *Perempuan dalam politik Partai Keadilan Sejahtera*, Yogyakarta, Titah Syurga, 2013.
- Syarifuddin, Amir *Meretas kebekuan ijtihad*, Jakarta, PT.Ciputat Press,
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung, Bumi Aksara, 1995.
- Utami, Tari Siwi, *Perempuan Politik di Parlemen*, Yogyakarta, Gama Media, 2001.
- Waluyo, Sapto, *Kebangkitan Politik Dakwah Konsep dan Praktek Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, Bandung, Harkatuna publishing, 2005.
- Wijaksana, MB, *et al*, *Politik dan keterwakilan perempuan*, Jakarta, Yayasan jurnal perempuan, 2004.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, tahun 2016/2017.

Wawancara

- Utomo, Agung, Ketua Umum DPD PKS Lampung Utara, Wawancara dengan penulis, Kotabumi, 23 Juli 2017.
- Alfan, Muhammad, Wakil Ketua Umum DPD PKS Lampung Utara, Wawancara dengan penulis, Kotabumi, 23 juli 2017.

Setiawan, Muhammad Nuzul, Sekertaris Umum DPD PKS Lampung Utara, Wawancara dengan penulis, Kotabumi, 13 Agustus 2017.

Masrurin, Nanik, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Wawancara dengan penulis, Kotabumi, 13 Agustus 2017.

Umar, Mardani, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wawancara dengan penulis, Gedung Negara, 04 Juli 2017.

Mirnasari, Erika, Ketua Humas DPD PKS Lampung Utara, Wawancara dengan penulis, Kotabumi, 09 November 2016.

Mu'arif, Jaenal, Ketua Bidang Kepemudaan DPD PKS Lampung Utara, Wawancara dengan penulis, Kotabumi, 14 Juli 2017.

Bariyah, Masyarakat Kotabumi Lampung Utara, Wawancara dengan penulis, Kotabumi, 31 Juli 2017.

Nur, Masyarakat Kotabumi Lampung Utara, Wawancara dengan penulis, Kotabumi, 31 Juli 2017.

Napiyah, Masyarakat Kotabumi Lampung Utara, Wawancara dengan penulis, 31 Juli 2017.

Dokumentasi

Sumber: Kumpulan Draft Panduan bidang perempuan Dewan Pengurus Pusat PKS.

Sumber: AD/ART Partai Keadilan Sejahtera.

Sumber: Platform Partai Keadilan Sejahtera.

Sumber: Arsip, DPD Partai Keadilan Sejahtera Lampung Utara, tahun 2015.

Sumber: Arsip, Kabupaten Lampung Utara, tahun 2017.

Sumber: Selayang Pandang, Kabupaten Lampung Utara, tahun 2017.



LAMIRAN



Pedoman Wawancara Untuk Responden

1. Bagaimana kondisi/perkembangan PKS Lampung Utara?
2. Bagaimana kondisi struktural dalam setiap kegiatan PKS?
3. Bagaimana pelayanan PKS Lampung Utara terhadap perempuan?
4. Adakah peraturan atau platform yang dibuat oleh PKS dalam meningkatkan kualitas kader perempuan partai untuk ikut bersaing dalam politik?
5. Bagaimana pendapat PKS dengan adanya kebijakan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah tentang 30% perempuan untuk ikut berkiprah dalam dunia politik?
6. Apasaja yang telah dilakukan oleh PKS sebagai bentuk konsistensinya terhadap aturan yang dibuat untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan di Lampung Utara?

Pedoman Wawancara Untuk informan

1. Apakah anda kenal dengan PKS?
2. Pengaruh apa saja yang anda rasakan dari PKS?
3. Apakah PKS pernah melaksanakan kegiatan tentang perempuan?
4. Apakah menurut anda kegiatan PKS ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

DAFTAR LAMPIRAN

- Daftar Lampiran I : Surat Keterangan Keaslian
Daftar Lampiran II : Surat Konsultasi
Daftar Lampiran III : Pedoman Wawancara
Daftar Lampiran IV : Daftar Nama Responden
Daftar Lampiran V : Daftar Nama Informan
Daftar Lampiran VI : Daftar Dokumentasi Responden dan Informan
Daftar Lampiran VII : Daftar Dokumentasi Kegiatan PKS
Daftar Lampiran VIII : Surat Keputusan Judul Skripsi
Daftar Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Institut Agama Islam Negeri Raden
Intan Lampung
Daftar Lampiran X : Surat Izin Penelitian Kantor Kesatuan Bangsa Dan
Politik Provinsi Lampung



Daftar Nama Responden

No.	Nama	Kedudukan
1	Agung Utomo	Ketua DPD PKS Lampung Utara
2	Muhammad Alfian	Wakil Ketua Umum DPD PKS Lampung Utara
3	Muhammad Nuzul Setiawan	Sekretaris Umum DPD PKS Lampung Utara
4	Nanik Masrurin	Ketua Bidang perempuan dan ketahanan keluarga

Daftar Nama Informan

No.	Nama	Kedudukan
1	Bariyah	Masyarakat
2	Napiyah	Masyarakat
3	Nur	Masyarakat



Daftar Dokumentasi Responden



**Wawancara dengan Bapak Agung Utomo, S. Sos.
(Ketua DPD PKS Kotabumi Lampung Utara)**



**Wawancara dengan Ibu Nanik Masrurin
(Ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga)**



**Wawancara dengan Bapak H. Mardani Umar. S.H, M.H.
(Anggota DPRD Provinsi Lampung)**



**Wawancara dengan Ibu bariyah
(Mayarakat)**



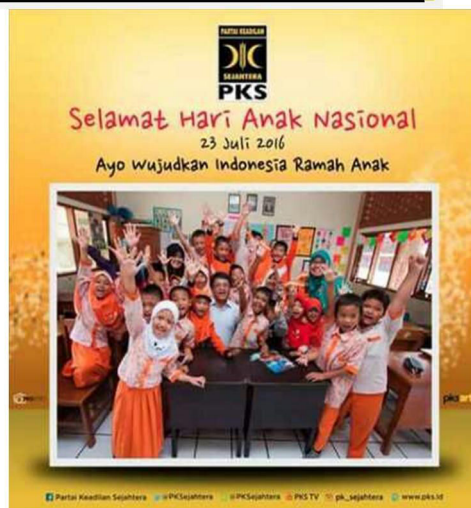
**Wawancara dengan Ibu Napiyah
(Masyarakat)**



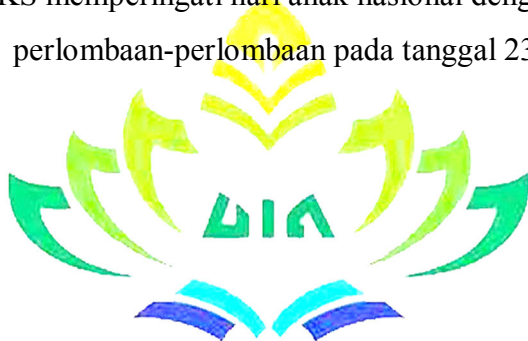
DOKUMENTASI KEGIATAN-KEGIATAN BIDANG PEREMPUAN DPD PKS LAMPUNG UTARA



(DPD PKS memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, pada minggu
tanggal 08/01/2017)



(DPD PKS memperingati hari anak nasional dengan mengadakan perlombaan-perlombaan pada tanggal 23 juli 2017)





(DPD PKS memperingati hari keluarga Nasional pada 26 juni 2016)



SELAMAT HARI KARTINI
21 April 2016

*Penempuan kuat bukan hanya karena otaknya
Penempuan pintar bukan hanya karena titlenya,
Penempuan sukses adalah yang berhasil
mengantarkan kebaikan kepada keluarga dan masyarakatnya.*

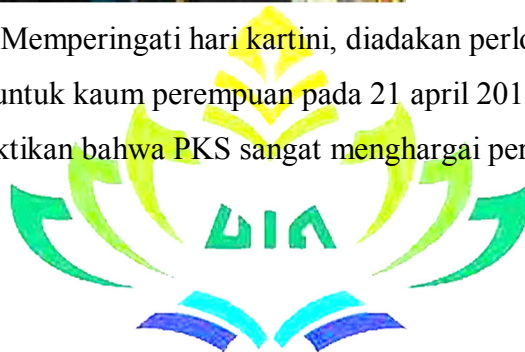
 **Nanik Masrurin**
Ketua BPKK
DPD PKS Lampung Utara

 **PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA
PKS**

www.pkstampung.blogspot.co.id  DPD PKS Lampung  @pkslamut

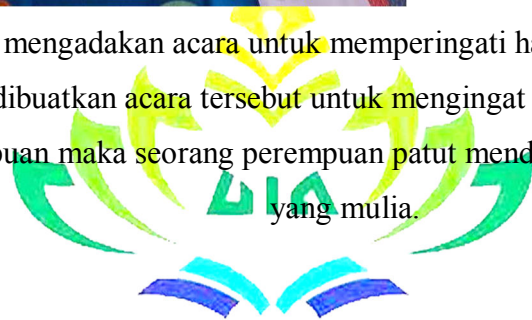


(DPD PKS Memperingati hari kartini, diadakan perlombaan-perlombaan khusus untuk kaum perempuan pada 21 april 2016, dalam hal ini PKS membuktikan bahwa PKS sangat menghargai perjuangan perempuan.





(DPD PKS mengadakan acara untuk memperingati hari ibu pada tanggal 2017) dibuatkan acara tersebut untuk mengingat perjuangan seorang perempuan maka seorang perempuan patut mendapatkan kedudukan yang mulia.





(DPD PKS Lampung Utara mengadakan penyuluhan kanker serviks di hadiri oleh ibu-ibu, dalam gebyar milad PKS di adakan di dalam DPD PKS pada tanggal Minggu, 07 Mei 2017)



(Rakor BPKK DPD PKS Lampung Utara)





(Acara 17 Agustus di kantor DPD PKS)



PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
DPD. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 Jl. Soekarno-Hatta No. 208 Kel. Tanjung Harapan Kec. Julalibini Selatan Kab. Lampung Utara Telp. (0724) 26012
Calon Anggota DPRD Kab. Lampung Utara Periode 2014-2019
 DP. 2 (SUNGKAI SELATAN, SUNGKAI JAYA, SUNGKAI BARAT, SUNGKAI TENGAH, SUNGKAI UTARA, HULU SUNGKAI, MUARA SUNGKAI, BUNGAMAYANG)

3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA				
1	MUHAMMAD ALFAN	1 MUHAMMAD ALFAN	2 FUMARUL RUMSYA, SE.	3 HJ. WIDYA ASTUTI	4 ADHI MULYANTA, SH.
2	FUMARUL RUMSYA, SE.	5 EKA USRI	6 BARRIAH	7 EDI SANTOSO, WAP	8 PRAYITNO, SE
3	Hj. WIDYA ASTUTI	9 ENI SRIWAHYUNI	10 AGUS SUPRIYANTO	11 MASKOLIL, A.Md	12 DIAN TANTRI MUSTIKARINI, A.Md
4	ADHI MULYANTA, SH.				
5	EKA USRI				
6	BARRIAH				
7	EDI SANTOSO, WAP				
8	PRAYITNO, SE				
9	ENI SRIWAHYUNI				
10	AGUS SUPRIYANTO				
11	MASKOLIL, A.Md				
12	DIAN TANTRI MUSTIKARINI, A.Md				

Cinta, Kerja, Harmoni

Dokumentasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara
 Dalam dokumen ini adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh PKS
 untuk memperjuangkan harkata dan martabat perempuan.



